

SENTRALISASI PEMBAYARAN GAJI POKOK PENDETA DI GMT

(Suatu Studi Pembangunan Jemaat).

T E S I S



Oleh

Yosepus Asbanu

NIM: 50 08 0233

Program Pasca Sarjana Fakultas Teologi  
Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

2010

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis dengan Judul:

**SENTRALISASI PEMBAYARAN GAJI POKOK PENDETA DI GMT**

**(Suatu Studi Pembangunan Jemaat)**

telah diajukan dan dipertahankan dalam sidang tesis pada tanggal: 15 November 2010 sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar: Magister Theologiae (M.Th).

Pembimbing I  
  
(Pdt. Yahya Wijaya, Ph.D)

Pembimbing II  
  
(Pdt. Chris Hartono, Th.D)

Penguji:

1. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar. ()
2. Pdt. Chris Hartono, Th.D. ()
3. Pdt. Yahya Wijaya, Ph.D. ()

Disahkan Oleh:

Direktur Program Pasca Sarjana Teologi

Universitas Kristen Duta wacana Yogyakarta



  
(Pdt. Yahya Wijaya, Ph.D)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Yosepus Asbanu

NIM : 50080233

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ini adalah karya penulis sendiri dan catatan referensi yang telah digunakan sesuai dengan makna aslinya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia melepaskan gelar keserjanaan saya.

Dibuat di Yogyakarta,

Pada tanggal: 27 Oktober 2010.



(Yosepus Asbanu)

## KATA PENGANTAR

Tesis ini merupakan bagian dari seperangkat aktivitas akademis yang disyaratkan untuk mengakhiri suatu studi formal pada Program Pasca Sarjana Teologi – Universitas Kristen Duta Wacana (PPST-UKDW) Yogyakarta. Ia disifatkan sebagai “jembatan” untuk melangkah dari bangku studi formal menuju medan pelayanan yang lebih terbuka, yakni Gereja dan masyarakat luas. Ia tidak saja ada sebagai hasil olahan akademis, tetapi juga “lahir” dari pergumulan konkret di GMTI. Karenanya, ia dapat dipandang sebagai salah satu “potret” teologi-kontekstual Gereja, yang tidak mudah disanggah secara apriori.

Tidak sedikit tantangan yang dialami penulis dalam merampungkan karya tulis ini. Namun, motto hidup penulis “AKU TIDAK AKAN BERARTI, JIKA TIDAK ADA “AKU” YANG LAIN” bukanlah ungkapan basa-basi belaka. Motto ini lahir dari pengalaman penulis dalam merampungkan karya tulis ini, bahkan sejak penulis dilahirkan ke bumi. Penulis sadar, bahwa banyak pihak telah hadir dan memungkinkan hadirnya karya tulis ini. Karena itu, sebelum diperkenalkan kepada pembaca, perkenankanlah penulis mengenang mereka, sekaligus menyampaikan penghargaan dan rasa hormat, terutama kepada:

1. Bapa Nahum dan Mama Victoria yang sekalipun telah tiada, namun dari mereka penulis dilahirkan dan dibesarkan, lalu belajar untuk berterima kasih kepada orang lain. Juga Kak John, Usi Ribka, Kak Iphu, Usi Ema, Usi Ance, dan adik Godlif. Dari mereka penulis belajar untuk saling mengasihi sebagaimana layaknya kakak-beradik dalam satu keluarga.
2. Semua “Pengajar” dan “Pendidik”, mulai dari SD s/d para Dosen PPST-UKDW Yogyakarta, yang kehadirannya bagaikan “pelita” dalam kegelapan dan “embun penyejuk” dalam kehausan. Di antaranya, tersebutlah Pdt. Yahya Wijaya, Ph.D dan Pdt. (emr) Chris Hartono, Th.D, yang sekalipun sibuk dengan kesibukan-kesibukan

pelayanannya, namun tetap setia dan dengan tulus memberikan keahliannya dalam membimbing sekaligus memotivasi penulis untuk merampungkan karya tulis ini. Khusus Pak Chris yang walaupun harus menikmati masa pensiunnya, namun tetap meluangkan waktu untuk menerima penulis di rumahnya, bukan saja berperan sebagai pembimbing, tetapi sekaligus melayani penulis seperti anaknya sendiri. Juga Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar yang bersedia membaca sekaligus bertindak sebagai penguji tesis ini. Kesetiaan, loyalitas, bahkan pengorbanan mereka mengharuskan penulis untuk mengukir “prasasti” ungkapan terima yang khusus secara tulus.

3. Almamater tercinta, Civitas Academica Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta yang telah menerima penulis untuk belajar. Juga rekan-rekan PPST angkatan Agustus 2008 (*Anggi, Adi, Bangun, Christin, Danang, Erni, Elyus, Eric, Frans, Frety, Johannes, Kukuh, Lukas, Ones, Okran, Robert, Stev, dan Utomo*) yang telah menerima dan hidup bersama penulis dalam suasana persaudaraan. Juga teman-teman dari GMIT (*Lia, Merens, Niko dan Sovi*) yang selalu mendoakan dan memberi semangat. Demikian juga Mba' Yuni yang penuh keramahan melayani di bagian administrasi. Penghargaan khusus penulis sampaikan kepada Mas Ariyanto (*Cleaning Service*) yang tidak saja setia membersihkan ruang kuliah, tetapi juga mempersiapkan teh dan air minum, sekaligus membersihkan peralatan minum yang penulis gunakan untuk menikmati suguhan minuman yang dipersiapkannya dengan ikhlas. Tanpa peran semua pihak civitas academica, tidak mungkin tercipta kondisi belajar yang kondusif untuk menikmati sajian-sajian akademis yang disuguhkan, yang selanjutnya dihayati dan dikembangkan penulis seperti ini.
4. Seluruh anggota jemaat GMIT yang melalui Majelis Sinode telah memberikan rekomendasi dan kesempatan belajar, sekaligus mengizinkan penulis untuk memanfaatkan “kolekte” jemaat dalam membiayai kebutuhan studi ini. Khusus Jemaat Imanuel Nemberala, Klasis Rote Barat Daya (tempat di mana penulis dibentuk menjadi seorang

- pendeta), yang sekalipun dengan “berat hati”, namun mengizinkan penulis untuk menikmati kesempatan studi ini. Juga Jemaat-jemaat, para pendeta, KPWK, Majelis Jemaat dan semua informan di Klasis Fatuleu Barat dan Klasis Kota Kupang yang menjadi tempat penelitian penulis untuk karya tulis ini. Khusus ibu Pdt. Fransina Fa’ot-Ledoh, S.Th (KPWK Fatule’u Barat) dan keluarga yang menampung penulis selama penelitian berlangsung.
5. Jemaat dan Majelis Jemaat GPIB Marga Mulya Yogyakarta yang berkenan menerima dan melibatkan penulis dalam aktivitas pelayanan. Melalui kesempatan itu, penulis tetap mendapati diri sebagai seorang pendeta, sekalipun menyanggah status mahasiswa.
  6. Bapak Widyatmoko dan Ibu Endang sekeluarga yang sekalipun sebagai pemilik kamar kos, namun tetap bersikap dan berfungsi sebagai orang tua, sehingga penulis merasa seperti berada di rumah sendiri.
  7. Pdt. Ishak A. Hendrik, M.Sc dan keluarga yang memberikan motor “si pitung” sehingga memudahkan penulis dalam aktivitas studi dan pelayanan di Yogyakarta.
  8. Keluargaku: Henny Nabuasa (istri tercinta), Vella, Nenty, Tisa dan Hallan (keempat buah hati tersayang), yang tidak pernah putus asa, tetapi tetap mendoakan dan mengharapkan keberhasilan penulis, sekalipun harus hidup tanpa bapak selama ± 2,5 tahun. Juga Fred, Apris, Ria, Eci, yang setia menemani anak-anakku di rumah. Hampir saja Hallan memanggil penulis (yang adalah bapaknya) sebagai “Om”, karena harus ditinggalkan penulis seusai merayakan ulang tahunnya yang pertama. Namun hal itu mendorong penulis untuk segera menyelesaikan studi ini dan kembali berkumpul dengan mereka.
  9. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan di sini, namun yang telah memberikan dukungannya bagi penulis. Dukunganmu tetap terpatri dalam sanubariku, dan terima kasihku menyertai pengorbananmu.

Di ujung permulaan barisan nama-nama yang disebutkan di atas, ada satu “Nama” yang tidak kelihatan, namun terasa kehadirannya. Kehadirannya itu membimbing, menguatkan, menghibur, menghidupkan bahkan menyelamatkan. Ia adalah ALLAH TRI TUNGGAL. Di dalam Kasih dan kepemimpinannya, penulis ingin belajar untuk terus melayani dalam GerejaNya. Bagi Dia, penulis ingin mempersembahkan hidup dan karya ini. Semoga bermanfaat bagi almamater dan GerejaNya, Gereja Masehi Injili di Timor. Akhirnya, kesempurnaan bukanlah milik penulis. Karena itu, semua saran dan kritik dari pembaca, penulis menerimanya dengan tulus demi penyempurnaan karya tulis ini.

Yogyakarta, Oktober 2010.

Penulis.



© UKDWN

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR SINGKATAN .....	xi
ABSTRAKSI .....	xiii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.  MASALAH PEMBAHASAN.....	1
A.1. Latar Belakang Masalah.....	1
A.2. Perumusan dan Pembatasan Masalah.....	9
A.3. Perumusan Hipotesis.....	10
B.  JUDUL PEMBAHASAN.....	10
C.  TUJUAN PEMBAHASAN.....	11
D.  KERANGKA TEORITIS .....	12
E.  METODE .....	13
E.1. Metode Pembahasan .....	13
E.2. Metode Pengumpulan Data .....	13
E.2.1. Penelitian Lapangan (Field Research) dan Sampel .....	13
E.2.2. Penelitian Pustaka (Library Research).....	13
F.  SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	14

## **BAB II: GMT DENGAN SISTEM SENTRALISASI PEMBAYARAN GAJI**

<b>POKOK PENDETA .....</b>	<b>17</b>
<b>A. SEKILAS TENTANG JATI DIRI GMT .....</b>	<b>17</b>
A.1. Kenyataan Historis GMT .....	17
A.2. Perbendaharaan GMT .....	21
A.3. Sistem Kepemimpinan di GMT .....	24
<b>B. SENTRALISASI PEMBAYARAN GAJI POKOK KARYAWAN GMT .....</b>	<b>28</b>
B.1. Dasar Organisatoris dan Alkitabiah .....	28
B.2. Tujuan dan Harapan .....	30
B.3. Sumber Dana .....	33
B.4. Strategi Pelaksanaan .....	35
B. 5. Kelalaian dan Disiplin .....	37
B. 6. Realisasi Pelaksanaan .....	39
B.7. Tantangan Yang Dihadapi .....	43
B.8. Dampaknya dalam Jemaat .....	49
B.8.1.Dampak Negatif .....	50
B.8.2. Dampak Positif .....	53
B.9. Kapan Sentralisasi Berakhir? .....	56

## **BAB III: ANALISIS-TEORITIS TERHADAP SENTRALISASI GAJI**

### **PENDETA DI GMT BERDASARKAN LIMA ASPEK DASAR**

<b>PEMBANGUNAN JEMAAT .....</b>	<b>57</b>
<b>A. PENGANTAR . .....</b>	<b>57</b>
<b>B. ANALISIS TERHADAP LIMA ASPEK DASAR PEMBANGUNAN JEMAAT.....</b>	<b>58</b>

B.1. Bertindak Imani dan Rasional .....	58
B.2. Bertindak Fungsional, Terarah pada Tujuan dan Hasil .....	70
B.3. Bertindak Menurut Tata Waktu atau Secara Proses .....	75
B.4. Bertindak Menurut Tata Ruang atau Pengembangan Organisasi .....	83
B.5. Mengaktifkan Partisipasi .....	85
<b>BAB IV: REFLEKSI TEOLOGIS .....</b>	<b>92</b>
A. PENGANTAR .....	92
B. POKOK-POKOK REFLEKTIF .....	93
B.1. Bercermin pada Jemaat Perdana .....	93
B.2. Pantaskah Gereja Terlibat Dalam Dunia Bisnis? .....	106
B.3. Memanfaatkan Perbendaharaan Gereja Secara Proporsional .....	125
B.4. Memaknai Persekutuan Jemaat Secara Benar .....	137
<b>BAB. V: P E N U T U P .....</b>	<b>148</b>
A. PENGANTAR .....	148
B. KESIMPULAN .....	148
B.1. GMIT dengan Tantangan Pembiayaan Pelayanannya.....	148
B.2. Makna Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Pendeta di GMIT. ....	149
B.2.1. Wujud Oikonomia dan Implementasi Kepemimpinan Presbiterial- Sinodal.....	149
B.2.2. Bertujuan Positif bagi Pelayanan, namun Bukan Tanpa Risiko.....	151
B.2.3. Berkaitan Erat dengan Strategi Pembangunan Jemaat.....	153

B.2.4. Sebagai Wujud Persekutuan (Koinonia) dan Kebersamaan.....	155
B.2.5. Mendorong Terwujudnya Pelayanan Holistik dalam Gereja.....	157
B.2.6. Mendorong Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta (Materi) Secara Benar...	159
B.2.7. Merupakan Suatu Tindakan Teologis Sekaligus Kontekstual.....	160
C. USUL STUDI LEBIH LANJUT.....	162
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	163.
Lampiran 1: Jumlah Pendeta GMIT s/d Juli 2010 .....	163
Lampiran 2: Jemaat Wilayah Dengan Jumlah Mata Jemaat Lebih dari 4 (empat)....	165
Lampiran 3: Tabel Pembagian Range (I) Kontribusi Tiap Jemaat Untuk Sentralisasi GP Karyawan GMIT per Bulan .....	166
Lampiran 4: Tabel Perubahan Range (II) Kontribusi Tiap Jemaat Untuk Sentralisasi GP Karyawan GMIT per Bulan .....	167
Lampiran 5: Tabel Gaji Pokok Karyawan GMIT.....	168
Lampiran 6: Tabel Tunjangan Jabatan (Perbulan) .....	169
Lampiran 7: Tabel Tunjangan Kesejahteraan Karyawan (Perbulan) .....	170
Lampiran 8: Rumusan Pengakuan Iman GMIT.....	171
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	172

## DAFTAR SINGKATAN

APBJ	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat.
band.	: bandingkan.
BUDPP	: Badan Usaha Diakonia dan Pemberdayaan Perbendaharaan.
BPR-TLM	: Bank Perkreditan Rakyat-Tanaoba Lais Manekat.
BPPPJ	: Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Jemaat.
BPPPS	: Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Sinode.
BDKG	: Badan Diakonia Karyawan GMIT.
BDDDB	: Bantuan Dana Diakonia Bergulir.
BPK	: Badan Penerbit Kristen.
dst.	: dan seterusnya.
dll.	: dan lain-lain.
GMIT	: Gereja Masehi Injili di Timor.
GKPB	: Gereja Kristen Protestan di Bali.
GP	: Gaji Pokok.
GPI	: Gereja Protestan di Indonesia.
IDT	: Impres Desa Tertinggal.
KKN	: Kolusi, Koneksi dan Nepotisme.
Litbang	: Penelitian dan Pengembangan.
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro.
NTT	: Nusa Tenggara Timur.
NTB	: Nusa Tenggara Barat.
NZG	: Nederlandsch Zendeling Genootschap.
OHZ	: Oud-Hollandsche Zending.

PTTG	: Panitia Tetap Tata Gereja.
PMSU	: Pinjaman Modal Sarana Usaha.
PL	: Perjanjian Lama.
PB	: Perjanjian Baru.
PGI	: Persatuan Gereja-gereja di Indonesia.
PPST	: Program Pasca Sarjana Teologi.
SK	: Surat Keputusan.
SIN	: Sinode.
SDA	: Sumber Daya Alam.
SDM	: Sumber Daya Manusia.
TAP	: Ketetapan.
TPK	: Taman Pustaka Kristen.
Untrib	: Universitas Tribuana.
UKAW	: Universitas Kristen Arta Wacana.
UKDW	: Universitas Kristen Duta Wacana.
VOC	: Vereenigde Oost Indische Compagnie.
Yun	: Yunani.
YTLM	: Yayasan Tanaoba Lais Manekat.
YAO	: Yayasan Alfa Omega.

## ABSTRAKSI

Secara geografis, Jemaat-jemaat Gereja Masehi Injili di Timor (selanjutnya disebut GMT) dikategorikan dalam dua kategori, yakni Jemaat perkotaan dan Jemaat pedesaan. Di antara Jemaat-jemaat ini, terdapat sejumlah perbedaan. Salah satu perbedaannya yang sangat menyolok adalah, kemampuan finansial antara Jemaat yang satu dengan Jemaat yang lainnya. Perbedaan finansial ini berdampak pula pada perbedaan penggajian pendeta. Hal ini disebabkan karena sekalipun penempatan dan besaran gaji pendeta ditetapkan secara sentralistik melalui Surat Keputusan (SK) Majelis Sinode, namun pembayaran gaji tersebut diserahkan kepada Majelis Jemaat di mana pendeta tersebut melayani. Sistem penggajian ini oleh GMT disebut *desentralisasi*. Akibatnya, pendeta yang berada di Jemaat yang mampu, menerima gaji sesuai SK, sementara mereka yang melayani di Jemaat yang belum mampu, nyaris tidak pasti besar gaji yang diterima setiap bulannya. Hal ini mengusik rasa ketidakadilan dalam penggajian pendeta di GMT. Sehubungan dengan itu, maka sejak bulan Juli 2009, GMT memberlakukan sistem *Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Pendeta*. Dengan sistem ini, semua pendeta menerima gaji pokok yang sama, termasuk mereka yang melayani di Jemaat yang belum mampu secara finansial.

Jika kita melihat secara sambil-lalu, seolah-olah sistem *sentralisasi* ini hanya didorong oleh tuntutan ekonomi kontemporer, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para “kaum berjubah” (sekalipun hal ini tidak mungkin disangkal). Namun setelah penulis melakukan pengkajian lebih jauh, ternyata hal ini tidak saja karena pertimbangan ekonomi, tetapi juga dilandasi oleh pertimbangan teologis. Bahwa sentralisasi gaji ini juga merupakan wujud dari rasa solidaritas (*compassion*) antara Jemaat yang satu dengan Jemaat yang lainnya. Rasa solidaritas ini merupakan makna dari suatu persekutuan (*koinonia*) yang selalu diperdengarkan oleh Gereja. Di sini, metafora “Tubuh Kristus” dan “keluarga Allah” yang sering dikenakan bagi Gereja mendapat maknanya secara konkret. Selanjutnya penulis

menemukan, bahwa sentralisasi gaji ini juga merupakan *autokritik* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan perbendaharaan Gereja selama ini, yang cenderung memprioritaskan pembangunan fisik, daripada perhatian terhadap manusia, terutama mereka yang berkekurangan. Sentralisasi juga mendorong GMIT untuk mewujudkan konsep pelayanan holistik yang telah lama dirumuskan, termasuk perhatian GMIT terhadap peningkatan ekonomi Jemaat. Dengan demikian, GMIT tidak saja menuntut kesadaran “memberi” dari Jemaat, tetapi juga turut memikirkan bagaimana Jemaat mendapatkan sesuatu sebelum dipersembahkan sebagai akta imannya.

Dari studi Pembangunan Jemaat, penulis menemukan bahwa sistem penggajian pendeta secara sentralistik ini juga merupakan suatu tindakan (intervensi) Gereja yang cukup fungsional dalam rangka meningkatkan pelayanan GMIT secara menyeluruh. Tindakan ini merupakan “kolaborasi” atau “persenyawaan” antara *iman* dan *akal budi* (rasio) yang dilakukan bukan saja untuk menjawab kebutuhan “kekinian”, tetapi juga sekaligus merupakan tindakan *antisipatif* terhadap kebutuhan “keakanan” (masa depan) pelayanan Gereja. Sistem ini menempatkan Jemaat sebagai “subyek” yang berpartisipasi secara aktif dalam seluruh aspek pelayanan Jemaat, termasuk pembiayaan pelayanan.

Sekalipun cukup positif, fungsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teologis, namun sistem sentralisasi gaji pendeta ini pun tidak “steril” terhadap aspek negatif yang dapat terjadi. Gereja bisa saja terperangkap dalam satu ekstrem yang lain, yang menjadikan uang (materi) bukan sebagai sarana pelayanan, tetapi menjadi tujuan pelayanan. Hal ini penulis sebut sebagai “titik rawan”, sebab jika hal itu terjadi, maka GMIT telah kehilangan identitasnya sebagai pengemban “*missio Dei*” bagi dunia. Bagi penulis, sekalipun secara *praktis*, konteks menuntut GMIT untuk menyesuaikan (baca: merubah) strategi pelayanannya, namun secara *prinsipil*, GMIT harus tetap menjadi Gereja Tuhan yang terus membawa “Kabar Baik” bagi dunia yang terus berubah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. MASALAH PEMBAHASAN.

#### A.1. Latar Belakang Masalah.

Data statistik Gereja Masehi Injili di Timor (selanjutnya disebut GMIT) per Januari 2010 menunjukkan, bahwa setelah 63 tahun menjadi Gereja mandiri, kini GMIT memiliki tidak kurang dari 1,4 juta orang anggota jemaat, yang tersebar dalam 44 Klasis, 276 Jemaat, 1.746 Mata Jemaat yang selanjutnya tergabung dalam 468 Jemaat Wilayah, dan 89 Pos Pelayanan.<sup>1</sup> Dengan kata lain, saat ini GMIT memiliki 2.020 Jemaat dan Mata Jemaat. Jemaat dan Mata Jemaat ini digolongkan dalam dua kategori besar, yakni *Jemaat pedesaan*, dan *Jemaat perkotaan*.<sup>2</sup> Jika dihitung dalam prosentasi, maka 90% (1.818 buah) Jemaat/Mata Jemaat GMIT tersebar di wilayah pedesaan. Sebaliknya hanya 10% (202 buah) Jemaat yang berada di kota. Jemaat-jemaat ini dilayani oleh 742 orang pendeta.<sup>3</sup>

Sekalipun banyak perbedaan di antara Jemaat pedesaan dan Jemaat perkotaan, namun salah satu perbedaan yang sangat menyolok dan hendak dikemukakan dalam tulisan ini adalah tentang kemampuan secara finansial dalam membiayai seluruh pelayanan Jemaat. Mengang

---

<sup>1</sup> Dalam *Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 08/TAP/SIN-GMIT/XXIX/1999 tentang Peraturan Pokok GMIT Mengenai Jemaat, Bab II, pasal (3) ayat (1)* disebutkan, bahwa Jemaat GMIT berwujud dalam bentuk Jemaat dan Mata Jemaat. Yang dimaksud dengan Jemaat adalah persekutuan Jemaat setempat (lokal) yang dilayani oleh seorang atau beberapa orang Pendeta. Jemaat sering juga disebut Jemaat Tunggal atau mandiri, karena mampu membiayai pelayanannya sendiri. Sedangkan Mata Jemaat adalah persekutuan Jemaat setempat, yang kemudian bergabung dalam satu Jemaat Wilayah, yang dipimpin oleh seorang Pendeta. Sementara, Pos Pelayanan adalah persekutuan yang bakal menjadi Mata Jemaat. Mata Jemaat dan Pos Pelayanan biasanya belum mampu secara finansial untuk membiayai pelayanannya sendiri, sehingga harus bergabung dalam satu Jemaat Wilayah.

<sup>2</sup> Jemaat yang dikategorikan sebagai Jemaat pedesaan adalah Jemaat yang tersebar di desa-desa/kampung-kampung yang biasanya berada di pedalaman-pedalaman. Sebaliknya, Jemaat perkotaan adalah yang berada di ibu kota Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

<sup>3</sup> Data ini diambil dari Sekretaris Komisi Penelitian dan Pengembangan (litbang) Sinode GMIT, tanggal 14 April 2010 di Kantor Sinode GMIT. Jumlah 742 orang pendeta ini tidak termasuk 110 pendeta yang baru ditabis pada bulan Juli 2010, pendeta yang diperbantukan pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Universitas Tribuana (Untrib) Alor, Kantor Sinode, Yayasan-Yayasan GMIT, dan pendeta yang studi lanjut. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, maka pendeta GMIT yang berstatus sebagai Karyawan GMIT berjumlah 940 orang pendeta pada posisi Juli 2010 (Lihat: lampiran 1 pada hlm.163 dari tulisan ini).

terdapat juga beberapa Jemaat di desa yang cukup mampu secara finansial, namun secara umum Jemaat-jemaat di pedesaan itu memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang minim dan tidak menentu. Akibatnya, banyak program pelayanan yang tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Di samping itu, pembayaran gaji pendeta pun tidak menentu setiap bulannya. Itulah sebabnya Jemaat-jemaat di pedesaan sering juga disebut “Jemaat air mata”. Sebaliknya, Jemaat-jemaat di kota memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang relatif stabil, bahkan cenderung meningkat setiap bulan, sehingga pelayanan dapat dibiayai secara baik, termasuk pembayaran gaji pendeta. Karena itu, Jemaat-jemaat di kota sering juga disebut “Jemaat mata air”. Adanya kategori “Jemaat mata air” dan “Jemaat air mata” ini juga berdampak pada kesulitan penempatan dan pemutasian pendeta yang dilakukan oleh Majelis Sinode.<sup>4</sup>

Jika ditelusuri secara historis,<sup>5</sup> ternyata pergumulan pembiayaan pelayanan dan gaji pendeta ini telah menjadi persoalan klasik (laten) yang terus digumuli dari waktu ke waktu, sejak berdirinya GMIT. Pada periode awal (1947-1949), pembiayaan terhadap para pendeta belum dirasakan sebagai suatu masalah. Hal ini disebabkan karena pada periode tersebut belum ada pemisahan antara Gereja dengan negara, sehingga para pendeta dibiayai oleh negara, dalam hal ini pemerintah kolonial (Belanda). Namun sejak tahun 1950, setelah terjadi penyerahan kedaulatan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, maka terjadi pula pemisahan secara administratif (termasuk keuangan) antara pemerintah Indonesia dengan Gereja Protestan di Indonesia (GPI). Sejumlah uang likwidasi diberikan oleh negara kepada Gereja-Gereja mandiri (GMIM, GPM, GMIT dan

---

<sup>4</sup> Majelis sinode sering mengalami kendala ketika seorang pendeta harus ditempatkan di suatu Jemaat yang memang sudah diketahui ketidakmampuannya untuk membiayai gaji pendeta yang bersangkutan. Kadang kala juga ada prasangka negatif, seakan-akan mereka yang ditempatkan di Jemaat yang demikian merupakan “pembuangan” bagi pendeta tersebut. Namun ketika sentralisasi diberlakukan, keadaan ini semakin diminimalisir. (Wawancara dengan Ketua Majelis Sinode GMIT, tanggal 6 Januari dan 11 April 2010 di Kupang). Band. E. I. Nuban Timo, *Rencana Strategis MS. GMIT 2007-2011: Selangkah Maju Dalam Kemandirian Teologi, Daya dan Dana: GMIT Menyambut Hari Baru Pelayanan* (Kupang: September 2007), hlm. 10-14. (tanpa penerbit)

<sup>5</sup> Catatan historis ini dirangkum dari Frank L. Cooley, *Benih Yang Tumbuh XI, Memperkenalkan Gereja Masehi Injili di Timor* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi DGI, 1976), hlm. 52-94.

GPIB) untuk membiayai pelayanan masing-masing. Namun sesaat setelah uang likwidasi tersebut digunakan (1955), GMIT semakin merasakan permasalahan dalam pembiayaan pelayanan, termasuk pembayaran gaji para pendeta. Sehubungan dengan itu, maka diputuskanlah *desentralisasi*<sup>6</sup> keuangan GMIT. Keputusan ini memberi tanggungjawab penuh kepada Jemaat-jemaat untuk membiayai para pendeta yang melayani di Jemaat yang bersangkutan,<sup>7</sup> sekalipun Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan besaran nominal gaji pendeta ditetapkan oleh Majelis Sinode.

Pemberlakuan sistem *desentralisasi* pembayaran gaji pendeta ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah penggajian pendeta. Para pendeta yang melayani di Jemaat-jemaat pedesaan tetap tidak pernah menerima gaji sebagaimana yang tercantum dalam SK yang diterima. Hal ini berbeda dengan para pendeta yang melayani di Jemaat perkotaan, yang selalu menerima gaji sesuai SK. Perbedaan ini terjadi karena kemampuan finansial antara Jemaat pedesaan dan Jemaat perkotaan itu pun berbeda. Untuk menanggung biaya hidup pendeta, pada waktu lalu Jemaat-jemaat di pedesaan biasanya memiliki “kebun Gereja” dan “lambung Gereja” tersendiri. Bahan-bahan makanan yang diperoleh dari kebun Gereja tersebut diperuntukkan bagi berbagai bentuk pelayanan, termasuk membiayai gaji pendeta. Bahkan ada Jemaat yang bergotong-royong untuk membuat kebun bagi pendeta yang melayani mereka.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Desentralisasi (ala GMIT) adalah: bahwa sekalipun Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan penggajian pendeta diterbitkan oleh Majelis Sinode, namun pembayaran gaji tersebut dibebankan kepada Jemaat di mana pendeta yang bersangkutan ditempatkan oleh Majelis Sinode untuk melayani. Jadi, besarnya gaji pendeta ditetapkan oleh Majelis Sinode (sentralistik), sedangkan realisasi pembayaran gaji tersebut dilakukan oleh Jemaat (desentralistik). Hal ini mengacu pada amanat Tata Dasar GMIT tentang perbendaharaan, yakni wewenang kepemilikan perbendaharaan dipegang oleh Sinode, sedangkan wewenang pengelolaannya dipegang oleh Majelis Sinode dan Majelis Jemaat, dan dipertanggungjawabkan kepada Sinode. Band. *Tata Dasar GMIT* (Kupang: Majelis Sinode GMIT, 1999), hlm. 15.

<sup>7</sup> Frank L. Cooley, *Benih Yang Tumbuh XI, Memperkenalkan Gereja Masehi Injili di Timor* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi DGI, 1976), hlm. 94. Band. Christiaan de Jonge, *Apa itu Calvinisme?* (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, cet-5, 2001), hlm. 37.

<sup>8</sup> Tentang hal ini, penulis teringat nasihat orang tua ketika penulis hendak masuk Fakultas Teologi. Menurut nasihat orang tua, jika nanti penulis menjadi pendeta, supaya tidak boleh menuntut gaji yang besar, sebaliknya harus tetap merasa bersukacita menerima kebun yang disiapkan Jemaat. Sayangnya, tradisi pembuatan kebun dan lambung Gereja ini, dewasa ini sudah tidak ditemukan lagi di Jemaat pedesaan.

Ketidakkampuan Jemaat-jemaat pedesaan secara finansial ini, juga berdampak pada pelayanan Jemaat yang tidak berjalan secara maksimal. Biasanya, beberapa *Mata Jemaat* yang belum mampu secara finansial itu bergabung menjadi satu Jemaat Wilayah yang dilayani oleh seorang pendeta. Setiap Jemaat Wilayah mempunyai 2-11 Mata Jemaat.<sup>9</sup> Gabungan beberapa Mata Jemaat ini menjadikan wilayah pelayanan tersebut sangat luas untuk dijangkau, dengan anggota jemaat yang sangat banyak pula. Idealnya, Jemaat Wilayah yang sangat luas tersebut harus dimekarkan, atau perlu penambahan tenaga pendeta. Namun hal itu tidak mudah dilakukan, sebab Mata Jemaat-Mata Jemaat tersebut belum mampu membiayai pelayanannya sendiri, termasuk membayar gaji pendeta. Di sinilah dilemanya, yakni jika mau menambah pendeta, maka pendeta tersebut tidak akan menerima gaji sesuai SK Majelis Sinode. Namun jika tidak menambah pendeta, maka pelayanan pendeta di Jemaat tidak mungkin berjalan secara maksimal. Konsekuensinya adalah, setiap hari Minggu pendeta hanya melayani secara bergilir di Mata Jemaat-Mata Jemaat tersebut. Karena itu, pendeta sering dijuluki “pendeta mimbar” atau “pendeta sakramen”. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pendeta, kecuali pelayanan mimbar (khotbah) pada hari Minggu, pelayanan sakramen yang biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali, dan pemberkatan nikah. Meskipun ada program yang direncanakan dalam *Persidangan Jemaat*,<sup>10</sup> namun tidak semua program tersebut dapat dilaksanakan karena minimnya pendapatan Jemaat. Hal ini tentunya berdampak pada lambannya pertumbuhan Jemaat secara kualitas.

Kemampuan finansial yang tidak seimbang dari Jemaat-jemaat dalam membiayai pelayanan dan pembayaran gaji pendeta sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi salah satu pokok pembahasan dalam persidangan-persidangan, baik di aras Jemaat, Klasis, maupun

---

<sup>9</sup> Penyebaran Mata Jemaat di setiap Klasis dapat dilihat pada lampiran 2, hlm.165 dari tulisan ini.

<sup>10</sup> Persidangan Jemaat adalah suatu persidangan di aras Jemaat yang dilangsungkan sekali dalam setahun dan dihadiri oleh Majelis Jemaat, Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Jemaat (BPPPJ), dan anggota sisi dalam Jemaat tersebut. Salah satu tujuan Persidangan Jemaat adalah mengevaluasi dan menetapkan Program Pelayanan . Lihat: “Peraturan Pokok GMIT tentang Jemaat, Bab.VII, pasal 25”, dalam: *Tata GMIT 1999* (Kupang: Majelis Sinode GMIT, 1999), hlm.88.

Sinode. Disadari, bahwa perbedaan penerimaan gaji antara Jemaat pedesaan dan Jemaat perkotaan menimbulkan rasa ketidakadilan dalam Gereja. Rasa ketidakadilan ini muncul, karena jika mengacu kepada Keputusan Sidang Sinode GMIT XXV No. 6 tahun 1983 tentang Peraturan Gaji Karyawan GMIT,<sup>11</sup> maka sebagai karyawan GMIT, semua pendeta mempunyai hak yang sama untuk menikmati gajinya, baik yang melayani di “Jemaat mata air” maupun yang melayani di “Jemaat air mata”. Semua pendeta diangkat melalui SK Majelis Sinode dengan jumlah nominal gaji yang sama. Namun karena gaji pendeta dibayar dari perbendaharaan GMIT yang dikelola oleh Majelis Jemaat di mana pendeta tersebut melayani (dibayar secara desentralistik), maka realisasi SK (yang diterbitkan secara sentralistik) tersebut tidak sama bagi semua pendeta. Hal ini disebabkan karena pendapatan finansial setiap bulan dari Jemaat-jemaat pedesaan selalu tidak cukup untuk membiayai semua bentuk pelayanan, dan membayar gaji pendeta yang melayani di Jemaat tersebut. Akibatnya, pendeta-pendeta tersebut tidak pernah menerima gajinya sesuai SK yang diterima dari Majelis Sinode. Angka-angka (besar gaji) dalam SK tersebut selalu “diabaikan”, dan pendeta menerima gaji apa adanya sesuai dengan pendapatan Jemaat yang bersangkutan, yang besarnya tidak menentu (fluktuatif), tergantung besarnya pendapatan Jemaat setiap bulannya.<sup>12</sup> Majelis Jemaat selalu melakukan “negosiasi” dengan pendeta tentang besar gaji yang hendak diterimanya, tanpa melihat SK yang dimiliki. Karena itu, sering pendeta hanya bisa menerima sebagian dari gajinya, karena disesuaikan dengan kemampuan Jemaat pada bulan yang bersangkutan. Hal ini berlangsung selama pendeta yang bersangkutan melayani di Jemaat-jemaat pedesaan, tanpa ada perhitungan “kekurangan gaji”. Sebaliknya, pendeta-pendeta di “Jemaat mata air” selain menerima gaji sesuai SK, juga menerima Tunjangan Hari

---

<sup>11</sup> Kata “karyawan” dalam Peraturan ini menunjuk pada para “pendeta” yang melayani di GMIT. Karena itu, dalam tulisan ini kedua kata ini (karyawan dan pendeta) akan digunakan secara bergantian, sebab keduanya menunjuk pada subyek yang sama, yakni mereka yang melayani sebagai pendeta di GMIT.

<sup>12</sup> Wawancara dengan M. Bani (tokoh Jemaat di Klasis Fatuleu Barat), tanggal 2 April 2010. Band. E. I. Nuban Timo, *Rencana Strategis MS-GMIT 2007-2011: Selangkah Maju Dalam Kemandirian Teologi, Daya dan Dana: GMIT Menyambut Hari Baru Pelayanan* (Kupang: September 2007), hlm. 8 (tanpa penerbit)

Raya (THR) dan fasilitas penunjang lainnya (rumah, telpon, listrik, air, transportasi, motor/mobil).

Memang harus diakui, bahwa jumlah Jemaat pedesaan yang belum mampu secara finansial untuk membiayai pelayanannya terus berkurang dari waktu ke waktu. Sampai bulan Juni 2009 (sebelum Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Pendeta diberlakukan), dari 742 orang pendeta GMIT yang melayani di Jemaat-jemaat, masih terdapat 297 orang (40%) yang belum menerima gaji sesuai SK yang diterima dari Majelis Sinode.<sup>13</sup> Hal ini berarti, bahwa rata-rata setiap Klasis terdapat 6 sampai 7 orang pendeta yang belum menerima gaji sesuai SK. Sebagai karyawan yang tergabung dalam satu *korps* yang disebut pendeta/karyawan GMIT, serta melayani secara bersama-sama dalam satu lembaga Gereja yang disebut GMIT, maka perbedaan penerimaan gaji ini tetap dipandang sebagai suatu ketidakadilan. Perbedaan ini terus mengusik rasa ketidakadilan dalam pemberian gaji bagi pendeta GMIT, dan karena itu dipandang sebagai sesuatu yang harus diatasi bersama-sama secara lembaga. Upaya Jemaat-jemaat GMIT untuk mengatasi kesenjangan penggajian pendeta secara bersama-sama ini dirasa penting, sebab sejak berdirinya, GMIT memang menganut sistem kepemimpinan *presbiterial-sinodal*,<sup>14</sup> yang pada satu pihak mengakui *otonomi Jemaat-jemaat*, namun pada pihak yang lain juga mengedepankan *kebersamaan* secara sinodal.

Ketidakadilan pembayaran gaji pendeta ini tidak saja dirasakan pada saat pendeta yang bersangkutan aktif melayani, tetapi juga berdampak pada masa purna-layan (pensiun). Pendeta-pendeta yang tidak menerima gaji sesuai SK selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban premi pensiunnya setiap bulan. Akibatnya, mereka tidak memperoleh gaji pensiun setelah masa pelayanannya berakhir. Pepatah tua “habis manis sepah dibuang”, seakan berlaku bagi pendeta-pendeta yang melayani di “Jemaat air mata” ketika memasuki

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bendahara Majelis Sinode dan Sekretaris Komisi Penelitian dan Pengembangan GMIT di Kupang, tanggal 9 April 2010.

<sup>14</sup> Band. *Tata GMIT 1999* (Kupang: Majelis Sinode GMIT, 1999), hlm.8. Sistem presbiterial-sinodal ini akan diuraikan tersendiri dalam penulisan tesis ini untuk melihat keterkaitannya dengan pemberlakuan sentralisasi gaji pendeta di GMIT (lihat: Bab II, hlm. 24-28 dari tulisan ini).

masa emeritasnya. Sebaliknya, para pendeta yang melayani di “Jemaat mata air” terus menikmati hidup dengan serba berkecukupan, jika tidak mau dikatakan *sangat melimpah*.<sup>15</sup> Bahkan lebih tragis lagi (dan ini sangat disayangkan), bahwa banyak Jemaat kota yang menimbun perbendaharaannya (uang) di Bank dalam jumlah yang sangat besar, sementara ada pendeta emeritus dan keluarganya yang “terlantar” karena belum memiliki rumah pribadi setelah pensiun. Rasanya hal ini tidak perlu terjadi dalam Gereja yang selalu mengajarkan cinta kasih, termasuk menghormati mereka yang melibatkan diri dan seluruh waktunya untuk memberitakan Injil dan melayani Jemaat (band.1 Tes. 5:12).

Rasa ketidakadilan dalam pembayaran gaji pendeta, berikut dampaknya sebagaimana digambarkan di atas, telah menjadi pergumulan yang sangat memprihatinkan. Perbedaan penggajian pendeta ini telah disadari sebagai salah satu pergumulan GMIT secara sinodal. Hal ini berarti bahwa Jemaat-jemaat yang tidak mampu membayar gaji pendetanya harus menjadi perhatian Jemaat-jemaat se-GMIT, bukan hanya tanggungjawab Jemaat di mana pendeta tersebut melayani. Itulah sebabnya, dalam salah satu Surat Gambalnya, Majelis Sinode menulis sebagai berikut:

“Salah satu pergumulan GMIT yang dipercakapkan dari satu sidang ke sidang yang lainnya adalah kesejahteraan para pelayan Tuhan, dan bagaimana saling menolong dalam hal dana di antara Jemaat yang satu dengan yang lainnya. Berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan agar terwujudnya prinsip: “yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, sehingga mereka tidak hanya mencari kepentingan dan kesenangan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga, sebagaimana yang telah Kristus perbuat” (bnd. Roma 15:1-3; Filipi 2:4).”<sup>16</sup>

Gambaran di atas menunjukkan, bahwa perbedaan kemampuan finansial antara Jemaat-jemaat pedesaan dengan Jemaat-jemaat perkotaan, ternyata mengakibatkan beberapa persoalan pelayanan. *Pertama*, ketidakmampuan Jemaat-jemaat pedesaan dalam membiayai

---

<sup>15</sup> Pandangan ini dirangkum dari hasil wawancara dengan Pdt. Em. John St.Yusuf (pensiun), pada tanggal 15 April 2010, dan Pdt. Em. A. Ina, B.Th (pensiun), tanggal 17 Mei 2010 di Kupang.

<sup>16</sup> “Surat Gambala Dalam Rangka Sentralisasi Gaji Pokok”, dalam *Tata GMIT tentang Peraturan Gaji Pejabat dan Karyawan GMIT Nomor: 11/TAP/SIN-GMIT/XXI/2007*, dan *Pedoman Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Karyawan GMIT Nomor: 863/SK/MS-GMIT/I/2008*, (Kupang: Majelis Sinode GMIT, 2008), hlm. 1.

seluruh bentuk pelayanannya, termasuk pembayaran gaji pendeta. *Kedua*, pelayanan di Jemaat-jemaat pedesaan berjalan secara tidak maksimal (baca: apa adanya), yang tergambar dengan julukan “pendeta mimbar” atau “pendeta sakramen”. *Ketiga*, lambannya rekrutmen/pengangkatan pendeta karena sulitnya pemekaran Jemaat-jemaat. *Keempat*, timbulnya kesulitan dalam penempatan dan pemutasian pendeta, karena adanya “Jemaat mata air” dan “Jemaat air mata”. *Kelima*, timbulnya rasa ketidakadilan dalam penggajian pendeta, baik ketika masih aktif melayani maupun setelah masa purna-layan (emeritus).

Dalam rangka menyasati berbagai permasalahan pelayanan yang memprihatinkan di atas, GMIT memprioritaskan persoalan ketidakadilan dalam penggajian pendeta. Dengan memprioritaskan penggajian yang lebih adil bagi para pendeta, maka diharapkan sejumlah persoalan pelayanan di atas dapat teratasi secara baik.<sup>17</sup> Sehubungan dengan itu, maka Sidang Sinode XXXI di Kalabahi (pulau Alor) pada tahun 2007, telah menghasilkan Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 11/TAP/SIN-GMIT/XXI/2007, tentang Peraturan Gaji Pejabat dan Karyawan GMIT. Ketetapan ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Majelis Sinode GMIT Nomor: 863/SK/MS-GMIT/I/2008, tentang *Pedoman Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Karyawan GMIT*.<sup>18</sup> Dalam Pedoman tersebut telah diatur, bahwa Pembayaran Gaji Pokok Karyawan GMIT dibayar secara terpusat melalui perbendaharaan GMIT yang dikelola oleh Majelis Sinode, sementara tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan Peraturan Gaji Pejabat dan Karyawan GMIT, dibayar melalui perbendaharaan GMIT yang dikelola oleh Majelis Jemaat di mana pendeta yang bersangkutan

---

<sup>17</sup> Lihat tulisan ini: *Bab II. B.2* tentang “Tujuan dan Harapan”, hlm. 30-32.

<sup>18</sup> Istilah Sentralisasi (ala GMIT) yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah, bahwa Jemaat-jemaat tidak langsung membayar gaji pokok pendeta secara sendiri-sendiri, melainkan dibayar secara terpusat oleh Majelis Sinode. Meskipun demikian, dana untuk pembayaran gaji pendeta ini tetap dikumpulkan dari Jemaat-jemaat berdasarkan klasifikasi pendapatan setiap Jemaat. Lihat: “Pedoman Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Karyawan GMIT No.863/SK/MS-GMIT/I/2008, pasal 3 ayat 1”, dalam : *Tata GMIT tentang Peraturan Gaji Pejabat dan Karyawan GMIT Nomor: 11/TAP/SIN-GMIT/XXI/2007*, dan *Pedoman Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Karyawan GMIT Nomor: 863/SK/MS-GMIT/I/2008*, (Kupang: Majelis Sinode GMIT, 2008), hlm. 34.

melayani. Keputusan tersebut secara efektif telah diberlakukan sejak bulan Juli 2009. Hal inilah yang menjadi fokus studi dalam pembahasan dan penulisan tesis ini.

#### *A.2. Perumusan dan Pembatasan Masalah.*

Dari uraian tentang latar belakang di atas, tergambar bahwa salah satu masalah laten yang dihadapi GMIT sejak berdirinya sampai saat ini adalah: *bahwa Jemaat-jemaat GMIT yang tersebar di desa dan kota tidak memiliki kemampuan finansial yang sama, yang berujung pada ketidakmampuan Jemaat-jemaat pedesaan untuk membiayai pelayanannya, termasuk membayar gaji pendeta.* Hal ini telah menjadi masalah krusial di GMIT, dan dianggap penting untuk ditanggulangi bersama sesuai prinsip presbiterial-sinodal yang dianut GMIT. Sehubungan dengan itu, maka lahirlah keputusan untuk memberlakukan *Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Karyawan GMIT*, yang secara efektif dilaksanakan sejak bulan Juli 2009.

Menyadari akan luasnya ruang lingkup permasalahan pada satu pihak, dan terbatasnya waktu dan biaya pembahasan pada pihak yang lain, maka pembahasan ini hanya akan difokuskan pada *“persoalan teologis-praktis dari pemberlakuan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Pendeta dan dampaknya bagi pelayanan di GMIT”*. Sehubungan dengan itu, maka fokus pembahasan ini dirumuskan dengan dua pertanyaan teologis berikut:

1. Apakah sentralisasi gaji pendeta dalam rangka mengatasi rasa ketidakadilan penggajian pendeta-pendeta merupakan solusi teologis-praktis yang didasarkan atas pandangan GMIT, bahwa gaji pendeta juga merupakan persoalan teologis? Ataukah hanya merupakan pertimbangan pragmatis-ekonomi demi peningkatan kesejahteraan pendeta?
2. Apa kelebihan dan kekurangan sistem sentralisasi gaji pendeta dalam hubungannya dengan peningkatan pelayanan Jemaat secara menyeluruh, baik sekarang maupun masa yang akan datang?

### A.3. Perumusan Hipotesis.

Jawaban sementara terhadap dua permasalahan yang dirumuskan di atas adalah:

1. Pemberlakuan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Karyawan GMTI merupakan tanggungjawab etis-teologis dari Jemaat terhadap pendeta yang melayani, sekaligus implementasi iman Jemaat dalam pelayanan Gereja. Meskipun demikian, hal itu pun tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global yang terus berkembang dan mempengaruhi berbagai bentuk pelayanan Gereja, termasuk pertimbangan ekonomi dewasa ini.
2. Pada satu sisi, sentralisasi gaji pokok pendeta berdampak positif bagi Pembangunan Jemaat. Namun pada sisi yang lain, berpotensi pula untuk hanya “menyelamatkan” pendeta dan “mengorbankan” Jemaat dan pelayanan. Di samping itu, sistem presbiterial-sinodal yang dianut GMTI bisa berubah menjadi sinodal-presbiterial, di mana Majelis Sinode memiliki kewenangan yang lebih besar dari Majelis Jemaat. Bahkan jika tidak diatur secara baik, hal ini berpotensi pula untuk menjadikan materi/uang sebagai motivasi dan tujuan pelayanan, dan bukan alat atau akibat dari pelayanan.

### B. JUDUL PEMBAHASAN.

Berdasarkan latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah serta hipotesis yang digambarkan di atas, maka pembahasan ini diramu dalam penulisan sebuah tesis dengan judul: “SENTRALISASI PEMBAYARAN GAJI POKOK PENDETA DI GMTI” (*Suatu Studi Pembangunan Jemaat*). *Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Pendeta* yang dimaksudkan adalah, bahwa gaji pokok dari semua pendeta GMTI dibayar secara sentralistik oleh Majelis Sinode, sekalipun dana untuk pembayaran gaji tersebut dikumpulkan dari Jemaat-jemaat. Sedangkan *Studi Pembangunan Jemaat* mengacu pada prinsip-prinsip dasar Pembangunan Jemaat yang perlu diperhatikan dalam setiap tindakan dan kebijakan pelayanan

Jemaat. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam judul di atas adalah, bahwa sistem Pembayaran Gaji Pokok Pendeta di GMIT tersebut akan dikaji secara teologis-praktis berdasarkan “Lima Aspek Dasar Pembangunan Jemaat”.<sup>19</sup>

Bagi penulis, judul di atas menarik untuk dikaji secara teologis, sebab setiap kebijakan Gereja seyogianya didasarkan pada prinsip-prinsip teologis yang jelas, dan bermanfaat bagi kepentingan pelayanan secara menyeluruh, bukan hanya untuk kepentingan individu atau pun kelompok/elit tertentu, termasuk pendeta. Apalagi, dari lima persoalan pelayanan yang digambarkan sebelumnya (lihat halaman 8), GMIT memilih untuk memprioritaskan pengumpulan terhadap ketidakadilan penggajian pendeta, bukan persoalan pelayanan lainnya yang juga sangat memprihatinkan. Hal ini tentunya menarik untuk dikaji lebih jauh, apalagi keputusan tersebut diambil ketika Gereja berada dalam suatu masa, di mana pertimbangan pragmatis-ekonomi telah menjadi “panglima” dalam berbagai ranah kehidupan.

Di samping menarik, sistem ini pun merupakan suatu persoalan yang aktual. Aktual, karena setelah 62 tahun berdiri, sistem ini baru pertama kali dilaksanakan di GMIT sejak bulan Juli 2009. Hal ini pun belum pernah dikaji secara ilmiah, khususnya di kalangan GMIT. Karena itu, kajian terhadap masalah ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu teologi secara umum, khususnya upaya pengembangan teologi yang berangkat dari konteks yang dihadapi. Selanjutnya, secara internal, kajian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pelayanan Jemaat-jemaat di GMIT.

### **C. TUJUAN PEMBAHASAN.**

Pembahasan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Karena itu, tujuan yang diharapkan dari pembahasan ini adalah: *Pertama*, mengkaji sistem Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Karyawan GMIT dari sudut pandang

---

<sup>19</sup> Lima Aspek Dasar Pembangunan Jemaat ini dapat dilihat dalam : P. G. van Hooijdonk, *Batu-Batu Yang Hidup: Pengantar ke dalam Pembangunan Jemaat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 68.

teologi-praktis, khususnya yang berhubungan dengan *Pembangunan Jemaat*. Dengan begitu, diharapkan sistem tersebut benar-benar merupakan refleksi sekaligus implementasi iman Jemaat-jemaat GMIT dalam rangka peningkatan pelayanan secara menyeluruh. *Kedua*, menemukan dampak positif dan atau negatif dari pemberlakuan sistem tersebut dan akibatnya bagi *Pembangunan Jemaat* di GMIT. Dengan demikian, dalam menerapkan ketentuan tersebut, GMIT dapat meningkatkan hal-hal positif bagi pelayanannya, sekaligus mewaspadai dampak negatif yang dapat merusak persekutuan umat, cenderung menghilangkan identitas Gereja, bahkan mengaburkan misi Allah yang diemban oleh GMIT.

#### **D. KERANGKA TEORITIS**

Karena tekanan studi ini berkaitan dengan bidang teologi-praktis, khususnya yang berhubungan dengan *Pembangunan Jemaat*, maka pemberlakuan sistem Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Pendeta ini akan dikaji lebih jauh berdasarkan “Lima Aspek Dasar *Pembangunan Jemaat*” yang ditawarkan oleh *Van Hooijdonk* berikut ini:<sup>20</sup>

1. Bertindak imani dan rasional.
2. Bertindak fungsional, terarah kepada tujuan dan hasil.
3. Bertindak menurut tata waktu atau secara proses.
4. Bertindak menurut tata ruang atau pengembangan organisasi.
5. Mengaktifkan partisipasi.

Dengan kata lain, sistem Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Pendeta yang sedang diberlakukan di GMIT ini akan dianalisa berdasarkan Lima Aspek Dasar *Pembangunan Jemaat* yang disebutkan di atas.

---

<sup>20</sup> Lihat: P. G. van Hooijdonk, *Batu-Batu Yang Hidup: Pengantar ke dalam Pembangunan Jemaat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 68. Kelima aspek tersebut akan diuraikan secara khusus dalam Bab III, tentang analisis-teoritis terhadap Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Karyawan GMIT (lihat halaman 57-91).

## E. METODE.

### E.1. Metode Pembahasan:

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini bersifat *deskriptif-analitis*. Maksudnya, data-data yang diperoleh akan dideskripsikan, disistematisasi, dan selanjutnya dianalisa/diinterpretasi untuk mendapatkan kesimpulan.

### E.2. Metode Pengumpulan Data.

#### E.2.1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Sampel.

Untuk mengetahui informasi dan data-data tentang pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Karyawan GMT, penulis telah melakukan penelitian lapangan dengan memakai metode *penelitian kualitatif*. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung (observasi partisipatoris) dengan wawancara terbuka.<sup>21</sup> Agar memperoleh data-data akurat yang mendukung tulisan ini, maka penulis telah melakukan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian itu berlangsung pada akhir bulan Maret sampai akhir Mei 2010. Dalam penelitian lapangan tersebut, penulis melakukan wawancara terhadap sejumlah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan, bahwa mereka merupakan tokoh-tokoh kunci yang mengetahui bahkan merasakan langsung masalah yang diteliti. Karena itu, mereka bukan saja sebagai responden, melainkan partisipan dalam penelitian.<sup>22</sup> Sampel-sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tersebut adalah:

- a. Majelis Sinode GMT.

---

<sup>21</sup> Wawancara terbuka adalah tipe wawancara yang lebih fleksibel, tidak berdasarkan pertanyaan yang baku (sekali pun ada pertanyaan penuntun), dilakukan secara formal maupun informal, pertanyaannya bersifat refleksif atau berstruktur, arahnya bebas atau terfokus, pertanyaannya terbuka atau tertutup. Lih. Jhon Mansford Prior, *Meneliti Jemaat: Pedoman Riset Partisipatoris* (Jakarta: Gramedia, Widiasarana Indonesia, 1997), hal. 95-98.

<sup>22</sup> Band. John Mansford Prior, *Meneliti Jemaat, Pedoman Riset Partisipatoris* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997), hlm. 38.

- b. Karyawan/pendeta GMIT, baik yang masih melayani maupun yang sudah purnalayan (pensiun).
- c. Majelis Jemaat, anggota jemaat, maupun tokoh Jemaat, baik dari Jemaat yang sudah mampu secara ekonomis (Jemaat kota), maupun yang belum (Jemaat desa).

Ketiga komponen sampel/partisipan ini dipilih secara acak dari tiga lokasi penelitian, yakni kantor Majelis Sinode GMIT, Klasis Fatuleu Barat (Kabupaten Kupang) sebagai representasi dari Jemaat pedesaan (Jemaat air mata), dan Klasis Kota Kupang sebagai representasi dari Jemaat kota (Jemaat mata air).

#### E.2.2. *Penelitian Pustaka (Library Research).*

Untuk melengkapi data-data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, penulis juga melakukan pembahasan pustaka untuk memperoleh data-data sekunder yang relevan, dalam rangka pencapaian tujuan pembahasan ini.

### **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.**

Semua hasil penelitian ini telah dituangkan dalam sebuah penulisan tesis dengan mengikuti sistematika atau pembabakan berikut ini:

- BAB I:           PENDAHULUAN.
  - A.           MASALAH PEMBAHASAN.
    - A. 1. Latar Belakang Masalah.
    - A. 2. Perumusan dan Pembatasan Masalah.
    - A. 3. Hipotesis.
  - B.           JUDUL PEMBAHASAN.
  - C.           TUJUAN PEMBAHASAN.

- D. KERANGKA TEORITIS.
- E. METODE.
- F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.

BAB II: GMIT DENGAN SISTEM SENTRALISASI PEMBAYARAN GAJI POKOK PENDETA.

A. SEKILAS TENTANG JATI DIRI GMIT.

- A.1. Kenyataan Historis GMIT.
- A.2. Perbendaharaan dan Harta Milik
- A.3. Sistem Kepemimpinan di GMIT.

B. SISTEM SENTRALISASI PEMBAYARAN GAJI POKOK KARYAWAN GMIT.

- B.1. Dasar Organisatoris dan Alkitabiah.
- B.2. Tujuan dan Harapan.
- B.3. Sumber Dana.
- B.4. Strategi Pelaksanaan.
- B.5. Kelalaian dan Disiplin.
- B.6. Realisasi Pelaksanaan.
- B.7. Tantangan Yang Dihadapi.
- B.8. Dampaknya Dalam Jemaat.
- B.9. Kapan Sentralisasi Berakhir?

BAB III: ANALISIS-TEORITIS TERHADAP SENTRALISASI GAJI POKOK PENDETA DI GMIT BERDASARKAN LIMA ASPEK DASAR PEMBANGUNAN JEMAAT.

- A. PENGANTAR
- B. ANALISA TERHADAP LIMA ASPEK DASAR PEMBANGUNAN JEMAAT.

1. Bertindak Imani dan Rasional.
2. Bertindak Fungsional, Terarah Kepada Tujuan dan Hasil.
3. Bertindak Menurut Tata Waktu atau Secara Proses.
4. Bertindak Menurut Tata Ruang atau Pengembangan Organisasi.
5. Mengaktifkan Partisipasi.

**BAB IV: REFLEKSI TEOLOGIS.**

**A. PENGANTAR.**

**B. POKOK-POKOK REFLEKTIF.**

1. Bercermin pada Jemaat Perdana.
2. Pantaskah Gereja Terlibat Dalam Dunia Bisnis?
3. Memanfaatkan Perbendaharaan Gereja Secara Proporsional.
4. Memaknai Persekutuan Jemaat Secara Benar.

**BAB V: PENUTUP.**

**A. PENGANTAR**

**B. KESIMPULAN AKHIR.**

**C. USUL STUDI LANJUTAN.**

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

## **BAB. V**

### **P E N U T U P**

#### **A. PENGANTAR.**

Bab V ini merupakan bagian penutup dari tulisan ini, yang terdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama merupakan *kesimpulan akhir* dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab I sampai Bab IV. Karena merupakan kesimpulan, maka hal-hal yang diungkapkan di sini sebenarnya hanya merupakan penegasan kembali dari apa yang telah diuraikan dalam Bab-Bab sebelumnya. Sekalipun demikian, diharapkan kesimpulan akhir ini merupakan “benar merah” yang dapat ditarik dari seluruh pembahasan ini. Sementara itu, bagian kedua merupakan sejumlah *saran untuk studi lanjutan*. Saran-saran penulis bagi pemberlakuan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Pendeta di GMIT sebenarnya sudah tersebar di seluruh uraian sebelumnya. Karena itu, saran dalam Bab ini hanyalah merupakan temuan-temuan penulis yang dapat diusulkan untuk distudikan lebih lanjut, baik oleh GMIT sendiri, maupun pihak lain yang merasa perlu.

#### **B. KESIMPULAN.**

##### ***B.1. GMIT dengan Tantangan Pembiayaan Pelayanannya.***

GMIT merupakan salah satu Gereja “arus utama” (mainstream) di Indonesia, yang eksis dan melayani di propinsi NTT (kecuali pulau Sumba), dan propinsi NTB (khususnya pulau Sumbawa). Medan pelayanan seperti ini menjadikan GMIT layak disebut Gereja kepulauan, sekaligus memiliki wilayah pelayanan yang sangat luas, dan jumlah anggota jemaat yang lumayan banyaknya ( $\pm$  1,4 juta orang). Jumlah anggota jemaat yang cukup banyak ini tersebar di berbagai Jemaat, baik di kota maupun di desa. Jemaat-jemaat ini berbeda dalam berbagai

hal, misalnya: jumlah anggota jemaat, SDM, SDA, luas wilayah pelayanan, dan kemampuan finansial untuk membiayai pelayanan, termasuk membayar gaji pendeta. Sekalipun pendeta-pendeta diberikan SK oleh Majelis Sinode dan menjadi karyawan GMIT, namun kebutuhan hidup (gaji) mereka dibebankan kepada Jemaat, sekaligus dibayar langsung oleh Jemaat di mana pendeta yang bersangkutan melayani. Sistem penggajian seperti ini oleh GMIT dikenal sebagai *desentralisasi*. Karena gaji pendeta dibayar langsung oleh setiap Jemaat, maka ada yang menerima gaji sesuai SK, namun ada juga yang menerima di bawah SK karena ketidakmampuan Jemaat untuk membayarnya. Setelah 62 tahun berlalu, sistem penggajian seperti ini dinilai sebagai ketidakadilan. Disebut demikian, karena ibarat anggota-anggota dalam satu rumah sekalipun berbeda kamar (demikianlah GMIT memahami diri sebagai satu keluarga), ternyata ada anggota keluarga yang “makan” sekenyang-kenyangnya karena kelimpahan, tetapi ada juga yang nyaris “tidak bisa makan” karena kekurangan. Hal ini tidak saja “memilukan” tetapi sekaligus “memalukan”. Inilah salah satu tantangan laten pelayanan yang dihadapi GMIT.

## ***B.2. Makna Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Pendeta di GMIT.***

### ***B.2.1. Wujud Oikonomia dan Implementasi Kepemimpinan Presbiterial-Sinodal.***

Menghadapi tantangan yang *memilukan* sekaligus *memalukan* di atas, maka GMIT berkesimpulan bahwa, jika dalam satu rumah ternyata ada yang kekenyangan karena kelimpahan, sementara ada yang nyaris kelaparan karena kekurangan, maka hal itu bukan karena makanan yang tersedia dalam rumah itu tidak cukup bagi semua anggota keluarga, melainkan karena para “pengatur” atau “pengelola” (*oikonomos*) yang salah mengatur atau salah mengelola stok makanan yang telah tersedia dalam rumah itu. Dengan kata lain, jika persediaan makanan dalam rumah itu dikelola secara baik, maka dijamin semua penghuni

rumah akan sama-sama kenyang, sekalipun masing-masing berada dalam kamar yang berbeda-beda. Hal ini berkaitan dengan tugas “penatalayanan” (*oikonomia*) Gereja. Untuk membuktikan hal itu, maka dalam Persidangan Sinode ke XXXI pada tahun 2007 di Kalabahi – pulau Alor, Jemaat-jemaat di GMIT bersepakat untuk mengganti sistem penggajian *desentralisasi* dengan sistem *sentralisasi*, sekalipun hanya sebatas gaji pokok pendeta, yang secara efektif diberlakukan sejak Juli 2009. Dalam sistem *sentralisasi* ini, Jemaat-jemaat yang mampu secara finansial dapat berkontribusi lebih dari gaji pendeta yang melayani mereka. Kelebihan tersebut dapat menutupi kekurangan dari Jemaat-jemaat yang belum mampu membayar gaji pendetanya. Sistem ini merupakan komitmen GMIT untuk mengatur “perbendaharaan” (baca: persediaan makanan) yang dimilikinya secara lebih baik dari sistem sebelumnya. Jika sistem sebelumnya (desentralisasi) merupakan sistem “makan sendiri-sendiri”, maka sistem sentralisasi merupakan sistem “makan bersama-sama”. Hal ini juga sekaligus merupakan implementasi dari sistem kepemimpinan *presbiterial-sinodal* yang dianut GMIT – suatu sistem kepemimpinan yang mengedepankan *kemajelisan* dan *kebersamaan*. Sistem kepemimpinan ini mensyaratkan pengaturan pelayanan secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Semua orang yang berada dalam persekutuan Gereja harus berjalan bersama-sama, sehingga *berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*.

Realitas GMIT yang terdiri dari Jemaat yang mampu dan yang belum mampu secara finansial haruslah ditanggapi secara teologis. Perbedaan tersebut jangan dilihat sebagai sesuatu yang memisahkan, melainkan merupakan peluang untuk membangun persekutuan dalam semangat kebersamaan. Kesadaran seperti ini sangatlah positif, sebab hakekat Gereja adalah kesediaan untuk saling menopang dan saling menguatkan. Perbedaan kemampuan finansial ini sekaligus merupakan konteks berteologi bagi Jemaat-jemaat GMIT.

### *B.2.2. Bertujuan Positif bagi Pelayanan, namun Bukan Tanpa Risiko.*

Pada satu sisi, sistem Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Pendeta itu bertujuan untuk mewujudkan pemberian gaji yang adil bagi semua pendeta GMIT di semua aras pelayanan, baik yang melayani di “Jemaat mata air” maupun yang melayani di “Jemaat air mata”. Serentak dengan itu, sistem penggajian tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan gaji pendeta sebagai karyawan GMIT, baik ketika masih aktif melayani, maupun setelah purna-layan (pensiun). Secara umum, rasa keadilan dalam penggajian ini telah terpenuhi, karena sejak pemberlakuan sistem tersebut, semua pendeta GMIT telah menerima gaji pokok sesuai SK yang diterbitkan oleh Majelis Sinode. Namun pada sisi yang lain, jika dicermati secara saksama, sistem penggajian tersebut juga berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan di GMIT secara menyeluruh. Peningkatan pelayanan itu mencakup peningkatan kinerja pelayanan pendeta, mendorong upaya untuk memperkecil wilayah pelayanan melalui pemekaran Jemaat Wilayah yang masih sangat luas, serta peningkatan rekrutmen dan mutasi pendeta. Jadi, sentralisasi gaji pendeta hanyalah salah satu strategi bagi peningkatan pelayanan secara menyeluruh, yang berujung pada peningkatan kinerja pelayanan pendeta.

Sekalipun demikian, peningkatan kinerja pelayanan pendeta tidak bertujuan untuk meningkatkan persembahan Jemaat. Peningkatan persembahan merupakan konsekuensi dari meningkatnya iman Jemaat. Jadi, sekalipun peningkatan pelayanan dapat berdampak bagi peningkatan iman Jemaat yang diwujudkan melalui kesadaran “memberi” dari Jemaat, namun pelayanan tidak boleh termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan persembahan. Hal ini memang sangat “tipis” untuk dibedakan, sebab pada satu sisi Gereja membutuhkan uang (materi) bagi pelayanannya, namun pada sisi yang lain, Gereja tidak melayani karena uang (materi). Karena sangat “tipis” untuk dibedakan, maka sekaligus merupakan salah satu “titik rawan” dalam pelayanan pendeta, yang perlu diwaspadai oleh GMIT dalam menata pelayanannya. Disebut “titik rawan” karena pada satu sisi pendeta yang Jemaatnya tidak

memberikan kontribusi akan berakibat pada ditahannya gaji pendeta yang bersangkutan. Hal ini dapat berakibat pada motivasi pelayanan yang salah dari seorang pendeta, yakni melayani agar kolekte meningkat sehingga gaji tidak ditahan oleh Majelis Sinode. Jadi, kolekte menjadi target atau tujuan pelayanan. Hal ini bisa menimbulkan salah paham dalam Jemaat, yang pada gilirannya dapat memicu konflik antara pendeta dengan Jemaat yang dilayaninya. Pada sisi yang lain, penahanan gaji pendeta sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Pendeta, dapat menimbulkan konflik antara pendeta dengan Majelis Sinode, sebab seakan-akan Majelis Sinode merupakan “atasan” dari pendeta yang *nota bene* adalah Ketua Majelis Jemaat. Kondisi seperti ini bukanlah spirit dari sistem kepemimpinan presbiterial-sinodal yang mengedepankan kemajelisan dan kebersamaan, bukan atasan-bawahan. Inilah yang penulis maksudkan dengan “titik rawan” tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka sekalipun persembahan anggota jemaat itu juga berkaitan dengan gaji, namun seorang pendeta harus tetap memiliki pemahaman, bahwa gaji merupakan konsekuensi logis dari pelayanan yang dilakukannya dengan penuh tanggungjawab. Karena itu, jika tidak melayani secara baik, maka harus menahan diri juga untuk tidak menerima gaji (band. 2 Tes. 3:10). Penahanan gaji (baca: disiplin) perlu dipahami sebagai proses “pemuridan” sehingga kinerja pelayanan pendeta sebagai seorang “hamba Tuhan” semakin ditingkatkan. Sebab, ketika materi menjadi tujuan pelayanan, maka sesungguhnya GMIT telah mengalami “kecelakaan teologis” karena telah menyimpang dari tujuan pelayanannya, yakni memberitakan “Kabar Baik” bagi dunia. Pelayanan GMIT hendaknya tetap pada prinsip, bahwa motivasi pelayanan harus tetap mengacu pada hakikat Gereja sebagai pengemban *misio Dei*. Hakekat Gereja dan motivasi pelayanan ini tidak boleh berubah, sekalipun strategi pelayanan harus berubah sebagai konsekuensi logis dari konteks pelayanan yang terus berubah pula. Para pendeta harus membuktikan kepada anggota jemaat sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, bahwa yang dicari dalam pelayanan bukan harta mereka, melainkan

diri anggota jemaat sendiri (2 Kor. 12:14). Dengan demikian, Gereja tidak menjadikan anggota jemaat sebagai “komoditi” untuk dieksploitasi bagi kepentingan “kaum berjubah”, melainkan subyek untuk diberdayakan, atau lebih tepat memberdayakan dirinya sebagai insan yang bermartabat – sebagai *imago Dei*. Hal ini penting untuk diperhatikan, sebab jika harta sebagai sarana menjadi tujuan, maka GMTI tidak saja kehilangan identitas dan integritasnya sebagai Gereja Tuhan, melainkan sekaligus akan sulit dibedakan dari suatu lembaga profit yang selalu berorientasi pada keuntungan finansial.

### *B.2.3. Berkaitan Erat dengan Strategi Pembangunan Jemaat.*

Ketika sistem Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Pendeta ini didalami dari studi Pembangunan Jemaat berdasarkan Lima Aspek Dasar Pembangunan Jemaat dari Van Hooijdonk, maka sistem tersebut dapat dipandang sebagai suatu “intervensi” yang berdampak bagi Pembangunan Jemaat secara keseluruhan. “Intervensi” ini tidak saja merupakan suatu tindakan yang cukup rasional, melainkan juga merupakan implementasi iman dari seluruh Jemaat GMTI. Tindakan imani dan rasional itu juga merupakan suatu tindakan yang cukup fungsional untuk mencapai tujuan pelayanan Gereja, yakni damai sejahtera bagi semua pihak, baik Jemaat maupun pendeta. Sistem itu diterapkan setelah melalui proses evaluasi terhadap sistem sebelumnya, serta menganalisis kebutuhan pelayanan ke depan. Pemberlakuan sistem tersebut disesuaikan dengan potensi setiap Jemaat, yang tergambar dari pengelompokan kategori pendapatan Jemaat (*range*) masing-masing. Hal ini sekaligus merupakan tindakan pengembangan GMTI sebagai organisasi, di mana setiap Jemaat diberdayakan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, sistem penggajian ini pun membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh anggota jemaat sebagai basis pelayanan, untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelayanan. Partisipasi anggota jemaat tersebut harus

berlangsung dalam suasana sukacita dan bersifat tetap (*continuous*). Anggota jemaat bukan “obyek” melainkan “subyek” dalam pelayanan.

Partisipasi aktif dari setiap orang yang bergabung dalam satu persekutuan (termasuk Gereja) sangatlah dibutuhkan dalam menyukseskan suatu kegiatan. Namun partisipasi tersebut sangat bergantung pada manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan itu. Setiap orang yang berpartisipasi harus merasakan manfaat dari keterlibatannya tersebut. Terkait dengan hal itu, maka jika Sentralisasi Gaji Pendeta itu hanya bermanfaat bagi pendeta, maka hampir dapat dipastikan bahwa lambat-laun partisipasi Jemaat akan menurun. Karena itu, semua yang berpartisipasi hendaknya berusaha secara maksimal untuk memberi manfaat bagi yang lainnya. Hal ini baru bisa terwujud jika ada keiklasan hati untuk tidak saja menuntut hak, melainkan juga memenuhi kewajiban tanpa paksaan. Dengan demikian, sekalipun tantangan bahkan konflik pasti ada dan terus mengiringi langkah kebersamaan, namun semua itu perlu ditangani secara kreatif (bukan destruktif), menuju harapan yang menanti.

Fungsional atau tidaknya suatu “intervensi” sangat ditentukan oleh *sistem* dan *pelaku* sistem. Sistem harus sederhana, praktis, dan realistis. Sementara itu, pelaku sistem harus memiliki etos kerja atau kinerja pelayanan yang bertanggungjawab. Karena itu, sebagai sebuah sistem, Sentralisasi Gaji Pendeta harus terus dibenahi agar benar-benar fungsional. Di samping itu, semua pihak yang terlibat pun harus terus membaharui komitmen untuk memenuhi tanggungjawabnya. Dengan demikian, tujuan bersama dapat digapai tanpa menghalalkan cara. Tujuan yang mulia itu harus diraih melalui cara yang mulia pula.

Perlu disadari pula, bahwa yang paling utama dalam Pembangunan Jemaat adalah membangun manusia (anggota jemaat), bukan organisasi. Karena itu, apa pun yang dilakukan harus selalu memprioritaskan relasi antar individu-individu yang bergabung dalam satu persekutuan Gereja. Sekalipun demikian, perhatian terhadap individu-individu tidak boleh mencederai kebersamaan dalam persekutuan. Justru individu-individu dalam “ruang” (baca:

Jemaat) tertentu, harus mampu merajut kebersamaan dengan sesamanya di “ruang” (Jemaat) yang lain, dalam “rumah” (Gereja atau sinode) yang sama. Dengan demikian, Pembangunan Jemaat yang benar akan mampu menciptakan individu-individu yang saling memperhatikan dalam satu persekutuan Gereja, yang dilandasi oleh spirit kebersamaan sebagai umat Allah (*familia Dei*). Semangat inilah yang sedang dibangun oleh GMIT melalui sistem Sentralisasi Gaji Pendeta, sekaligus “membendung” semangat individualisme yang ditawarkan oleh globalisasi.

#### *B.2.4. Sebagai Wujud Persekutuan (Koinonia) dan Kebersamaan.*

Sistem sentralisasi gaji pendeta juga dapat dipandang sebagai upaya Jemaat-jemaat GMIT untuk memaknai persekutuan (*koinonia*) di antara mereka. Bahwa *koinonia* yang selama ini didengungkan oleh Gereja bukan sekedar berkumpul dan beribadah dengan tata ibadah yang sama, memiliki pengakuan iman yang sama, atau pun kesamaan lainnya, melainkan persekutuan yang memiliki rasa solidaritas (*compassion*) satu dengan yang lainnya. Solidaritas ini dibangun atas dasar Kasih yang diajarkan oleh Yesus, bukan karena kepentingan-kepentingan tertentu secara “politis”. Artinya, kerelaan Jemaat-jemaat untuk saling membantu itu merupakan ciri khas sebagai orang Kristen, bukan karena “dipaksa” melalui Keputusan Sinode, atau karena ingin mendapatkan sesuatu. Melalui sentralisasi gaji pendeta, Jemaat-jemaat GMIT membuktikan diri bahwa mereka adalah satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah, sekalipun berbeda kamar.

Semangat untuk saling menopang ini pun sebenarnya mengacu kepada pola hidup Jemaat mula-mula. Bahwa sebagai satu keluarga yang disebut “keluarga Allah” (*familia Dei*), kebiasaan untuk saling memperhatikan itu adalah suatu keniscayaan. Sebagai pihak yang telah dikasihi Tuhan, maka adalah wajar jika Gereja (bahkan semua orang Kristen) mewujudkan kasih itu di antara mereka, terutama kepada mereka yang berkekurangan. Ini tugas bersama

yang harus diwujudkan oleh Gereja sepanjang masa. Spirit solidaritas antar Jemaat di GMT melalui sentralisasi gaji pendeta ini menunjukkan, bahwa sekalipun dewasa ini semangat solidaritas semakin terkikis karena spirit individualisme yang ditawarkan oleh globalisasi, namun Gereja harus tetap menjadi “tiang penyangga” bagi tetap berdirinya solidaritas tersebut. Kasih-mengasahi, tolong-menolong, topang-menopang dan hal-hal sejenisnya, harus tetap terpelihara dan menggereja dalam persekutuan orang percaya, sekalipun konteks yang dihadapi Gereja terus berubah. Gereja jangan hanya merupakan perkumpulan orang-orang yang kelihatan akrab dan bersatu pada saat tertentu, namun sesungguhnya masing-masing sibuk untuk mengurus dirinya sendiri.<sup>203</sup>

Adanya orang kaya dan orang miskin dalam Gereja (baca: dunia) merupakan suatu realitas yang telah ditemukan sejak Jemaat mula-mula. Demikian juga halnya dengan Jemaat yang mampu dan yang tidak mampu secara finansial. Di tengah-tengah realitas seperti inilah, Gereja hadir dan melayani. Gereja tidak perlu menyesali atau berusaha menghindari realitas tersebut, melainkan masuk ke dalam realitas itu dan melayani di dalamnya. Gereja harus menjadi “sosok” yang mau melayani di tengah-tengah penderitaan orang lain. Kalaupun Gereja harus ikut menderita, itulah konsekuensi logis dari panggilannya yang berpola kepada Kristus yang mau menjadi “hamba” yang melayani, bukan “tuan” yang menindas dan dilayani (Mat. 20:28).<sup>204</sup> Karena itu, yang dibutuhkan adalah membangun rasa solidaritas di dalam Gereja, baik sebagai organisasi maupun sebagai organisme. Solidaritas itu harus hidup menggereja (praxis), bukan sebatas verbalistik (konseptual). Gereja perlu sadar bahwa kehadirannya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain – untuk dunia di sekitarnya. “Gereja memang harus membentuk dirinya menjadi satu persekutuan yang utuh, sehingga menjadi persekutuan yang berfungsi bagi orang lain, bagi dunia.”<sup>205</sup>

---

<sup>203</sup> Band. E. G. Singgih, *Bergereja, Berteologi, dan Bermasyarakat* (Yogyakarta: TPK, cet.II, 2007), hlm.5-6.

<sup>204</sup> Band. Eka Darmaputera, *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia* ( Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), hal 318

<sup>205</sup> George W. Peters, *Teologi Pertumbuhan Gereja* (Malang: Gandum Mas, 2002), hlm. 178.

### *B.2.5. Mendorong Terwujudnya Pelayanan Holistik dalam Gereja.*

Agar tetap menjadi “tiang penyangga” bagi solidnya solidaritas di tengah godaan spirit individualisme dewasa ini, maka diperlukan upaya-upaya konkret bagi penguatan diri Gereja dalam berbagai ranah pelayanan, baik penguatan secara iman (spiritual), maupun penguatan secara material. Penguatan spiritual (iman) merupakan dasar bagi setiap tindakan kasih (solidaritas), sedangkan penguatan material (finansial) merupakan sarana bagi terwujudnya solidaritas sebagai implementasi iman. Sehubungan dengan itu, maka pelayanan Gereja tidak boleh hanya berorientasi pada bagaimana menumbuhkan kesadaran “memberi persembahan” dari anggota jemaat sebagai tindakan imannya, melainkan juga bagaimana meningkatkan pendapatan anggota jemaat supaya ia dapat memiliki apa yang hendak dipersembahkan. Perhatian Gereja terhadap pertumbuhan spiritual dan material ini harus dilakukan secara berimbang – keduanya harus dianggap sama pentingnya dalam pelayanan. Sebab, bagaimana Gereja mengharapkan peningkatan persembahan dari orang yang tidak memiliki sesuatu? Sebaliknya, bagaimana orang yang kaya dapat memberi, jika imannya tidak dipersiapkan untuk bertumbuh secara baik? Sehubungan dengan itu, maka hendaknya pelayanan Gereja tidak saja berorientasi pada kebutuhan spiritual, tetapi juga kebutuhan lain dari anggota jemaat, termasuk kebutuhan materialnya. Karena itu, Gereja perlu mempertimbangkan kembali sikap “alergi” bahkan “anti” dunia bisnis atau ekonomi. Bisnis perlu dilihat sebagai suatu panggilan (*vocation*), bukan sesuatu yang penuh kejahatan. Sebagai panggilan, bisnis menjadi tempat di mana Gereja menyatakan nilai-nilai kristiani di dalamnya. Nilai-nilai kristiani dimaksud adalah: kejujuran, keadilan, kebenaran, kasih, tidak diskriminatif, tidak eksploitatif, menghargai martabat manusia, tidak egoistis, memiliki rasa solidaritas terhadap yang menderita, ramah terhadap lingkungan hidup, dst.

Keterlibatan Gereja dalam bisnis tidak berarti bahwa bisnis telah dianggap sebagai “senjata pamungkas” yang diandalkan untuk menyelesaikan segala permasalahan pelayanan

yang dihadapi Gereja. Tidakkah demikian! Nasib Gereja memang tidak bergantung pada bisnis (materi). Gereja bergantung sepenuhnya pada Allah, Pendiri dan Pemilik Gereja. Gereja juga bukanlah perusahaan atau lembaga profit lainnya yang berorientasi pada keuntungan finansial (material). Karena itu, pelayanan Gereja juga tidak bertujuan untuk mencari keuntungan finansial. Meskipun demikian, Gereja membutuhkan finansial (uang) untuk melancarkan pelayanannya. Sehubungan dengan itu, maka Gereja tidak boleh menganggap dunia bisnis sebagai musuh (tantangan) yang harus dihindari, melainkan sebagai peluang bagi Gereja untuk bersaksi tentang kebenaran. Karena itu, jika dunia bisnis itu terkontaminasi dengan “kebusukan” atau “kegelapan”, maka Gereja harus hadir sebagai “garam” dan “terang” untuk “mengawetkan” dan “menerangi”. Untuk itu, Gereja sendiri harus tetap menjaga diri agar tidak menjadi busuk dan tidak menjadi gelap. Dengan kata lain, dunia bisnis harus dipandang sebagai suatu panggilan, yang di dalamnya Gereja boleh terlibat untuk menyaksikan Kerajaan Allah.

Nah, karena yang melayani dalam Gereja adalah manusia yang membutuhkan materi, dan pelayanan Gereja juga berorientasi kepada manusia yang juga membutuhkan materi, maka bagaimanapun juga, selama masih ada di dalam dunia, Gereja tetap membutuhkan materi sebagai sarana pelayanannya. Meskipun demikian, pelayanan Gereja sekali-kali tidak boleh ditentukan oleh materi. Atau, materi jangan menjadi penghalang bagi pelayanan Gereja. Sebab jika materi menjadi penghalang, maka Gereja (orang Kristen) telah gagal untuk menggapai tujuan hidupnya, yakni menjadi ahli waris Kerajaan Allah. Hal ini kita pelajari dari banyak cerita Alkitab, misalnya kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin (Luk.16:19-31), dan percakapan Tuhan Yesus dengan seorang pemuda yang memiliki banyak materi alias orang kaya (Mat. 19:16-26).

### *B.2.6. Mendorong Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta (Materi) Secara Benar.*

Gagalnya dua orang kaya untuk menikmati Kerajaan Allah dalam kedua kisah Alkitab yang disebutkan di atas bukan karena mereka adalah orang kaya, melainkan karena kedua orang itu keliru bahkan salah memanfaatkan kekayaan yang dimiliki. Kedua orang itu hanya kaya harta, tetapi miskin solidaritas. Keduanya lebih suka menimbun harta daripada berbagi dengan sesama yang membutuhkan perhatian. Terkait dengan hal ini, maka yang perlu diperhatikan oleh Gereja (orang Kristen) bukan saja bagaimana mendapatkan kekayaan, tetapi juga bagaimana dan untuk apa kekayaan itu dimanfaatkan. Baik cara memperoleh kekayaan maupun cara memanfaatkannya, keduanya harus dengan cara yang benar menurut Allah, yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Harta dan kekayaan harus dikorbankan demi manusia, bukan manusia justru menjadi korban karena harta. Sehubungan dengan itu, maka aksentuasi pelayanan Gereja yang selama ini lebih mengutamakan pembangunan fisik, atau kecenderungan untuk merasa bangga dengan Saldo Rekening Bank yang semakin besar, ketimbang peningkatan SDM anggota jemaat, perlu dievaluasi kembali. Gereja harus lebih berpihak pada kepentingan manusia, baik dalam pelayanan maupun pengelolaan dan pemanfaatan perbendaharaan. Keberpihakan seperti ini dipandang tepat, sebab itu jugalah yang dilakukan oleh Allah melalui hidup dan karya Yesus Kristus.

Sentralisasi juga merupakan “autokritik” bagi pengelolaan dan pemanfaatan perbendaharaan Gereja selama ini, sekaligus mendorong GMIT agar selalu berpihak kepada mereka yang berkekurangan (tentu dengan kesadaran, bahwa orang yang berkekurangan itu bukan hanya pendeta). Perhatian terhadap mereka yang menderita ini merupakan tugas semua orang Kristen tanpa kecuali. Hal itu mensyaratkan adanya persekutuan dan kebersamaan di dalam Gereja. Persekutuan dan kebersamaan yang dibangun tersebut sekaligus merupakan persekutuan dengan Allah Trinitaris – Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Fungsi dan peran yang berbeda dalam Gereja tidak boleh mencerderei persekutuan dan kebersamaan. Sebaliknya,

perbedaan-perbedaan itu justru merupakan kekayaan untuk saling melengkapi dalam semangat persekutuan dan kebersamaan itu. Persekutuan Gereja yang berada di luar Allah Trinitaris akan menjadikan Gereja kehilangan identitasnya sebagai Gereja Tuhan – alias bukan Gereja lagi.

#### *B.2.7. Merupakan Suatu Tindakan Teologis Sekaligus Kontekstual.*

Setelah mencermati sistem Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Pendeta di GMIT sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis berkesimpulan, bahwa sistem Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Pendeta itu di dorong oleh dua pertimbangan utama, yakni pertimbangan *teologis-praktis (etis-teologis)* dan pertimbangan *pragmatis-ekonomi*. Pada satu sisi, ada pertimbangan etis-teologis karena sebagai orang yang ditahbiskan dan dikhususkan untuk melayani anggota jemaat, pendeta berhak untuk memperoleh biaya hidup (gaji) dari Jemaat yang dilayani. Sebaliknya, Jemaat yang telah mendapatkan pelayanan pun bertanggungjawab untuk membiayai kebutuhan hidup seorang “hamba Tuhan” yang melayani mereka. Jadi ada pertimbangan teologis-praktis (etis-teologis) antara pendeta sebagai “hamba Tuhan” yang melayani, dan Jemaat sebagai umat Tuhan yang dilayani. Di samping itu, sistem sentralisasi juga merupakan wujud dari kebersamaan dan persekutuan (*koinonia*) yang selalu didengung-dengungkan oleh Gereja. *Koinonia* dalam Gereja itu berujung pada rasa solidaritas (*compassion*) satu terhadap yang lain. Realitas Jemaat-jemaat GMIT yang saling berbeda dalam kemampuan finansial itu bukanlah sesuatu yang perlu disesali, melainkan merupakan peluang untuk saling berbagi sebagai orang-orang bersaudara dalam *familia Dei* itu. Perbedaan-perbedaan itu harus dipandang sebagai kesempatan bagi Jemaat-jemaat GMIT untuk mengimplementasikan eksistensinya sebagai Gereja Tuhan yang telah dikasihi, dan karena itu harus saling mengasihi. Sikap ini jugalah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridNya. Sebab hanya dengan saling mengasihi, mereka layak disebut anak-anak

Allah (Yoh. 13:34-35). Dasar-dasar alkitabiah yang digunakan dalam pelaksanaan sentralisasi gaji ini sebenarnya menguatkan pertimbangan-pertimbangan teologis ini.

Pada sisi lain, ada juga pertimbangan pragmatis-ekonomi. Bahwa perkembangan ekonomi saat ini mengakibatkan tuntutan kebutuhan hidup pendeta pun semakin meningkat, sehingga jika gaji pendeta tidak dibayar sebagaimana seharusnya dalam SK, maka pendeta akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, baik ketika masih aktif melayani, maupun setelah pensiun. Dengan kata lain, tuntutan kebutuhan ekonomi saat ini mendorong GMT untuk merencanakan ulang sistem penggajian pendeta yang selama ini diberlakukan, sehingga mampu menjawab konteks ekonomi yang dihadapi. Pertimbangan ini pun sangat manusiawi. Sebab, sekalipun pendeta tidak melayani karena uang (materi), namun pendeta juga tetap manusia, dan karena itu tetap membutuhkan materi untuk hidup. Jadi, terdapat “kolaborasi” yang sangat kuat antara pertimbangan teologis-praktis (etis-teologis) dan pragmatis-ekonomi. Pertimbangan “teologis” menjadi dasar bertindak bagi Gereja, sedangkan “ekonomi” sebagai konteks yang mempengaruhi tindakan Gereja tersebut. Karena itu, menurut penulis, sistem tersebut juga dapat dipahami sebagai tindakan Gereja yang *teologis-kontekstual* – suatu tindakan untuk menjawab konteks yang dihadapi, berdasarkan konsep-konsep teologi yang diterima dan dihayati sebagai kehendak Allah.

Akhirnya, Gereja perlu menyadari, bahwa ia sementara berada dalam dunia yang semakin modern. Perkembangan ini diikuti dengan sejumlah hal, misalnya: kemajuan ilmu dan teknologi, semangat kapitalisme yang semakin mengglobal, semakin berkembangnya spirit individualisme, dst. Dalam kondisi seperti ini, maka akan semakin banyak orang yang “merasa mampu”, baik secara intelektual, maupun secara finansial. Maka, menurut penulis, Gereja harus mampu menyiasati ini dengan mengembangkan sikap yang lain, yakni bukan saja “merasa mampu”, tetapi juga harus “mampu merasa”. Dengan demikian, Gereja tidak akan puas sendiri dengan sejumlah kemampuan yang dimilikinya, melainkan dapat merasakan

apa yang dirasakan oleh mereka yang menderita karena berbagai kekurangan. Hanya dengan sikap “mampu merasa” inilah, kita akan mampu membangun solidaritas (compassion) terhadap mereka yang menderita di sekitar kita, dengan kemampuan yang ada pada kita. Sikap inilah yang kita pelajari dari hidup dan karya Yesus, Pemilik dan Kepala Gereja.

### C. USUL STUDI LEBIH LANJUT.

Dari seluruh pembahasan ini, menurut penulis terdapat tiga hal yang mengemuka dan perlu distudikan lebih jauh. *Pertama:* Gereja sadar bahwa aksentuasi pelayanannya harus mengikuti keberpihakan Allah, yakni lebih memprioritaskan manusia, terutama mereka yang menderita. Namun, ternyata Gereja lebih mengutamakan pembangunan fisik daripada pemberdayaan insani. Mengapa terjadi inkonsistensi demikian? Bagaimana pandangan teologis tentang pembangunan gedung gereja?

*Kedua:* Tujuan yang hendak dicapai melalui sentralisasi gaji pendeta adalah adanya peningkatan pelayanan Jemaat secara menyeluruh. Karena itu, dibutuhkan penilaian kinerja pelayanan pendeta sebagai karyawan GMIT. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak menilai kinerja seorang pendeta sebagai “hamba Tuhan”? Lalu, bagaimana format dan mekanisme penilaian yang digunakan sehingga Gereja tidak identik dengan negara? Bagaimana pandangan teologis tentang penilaian kinerja pelayanan pendeta?

*Ketiga:* Secara konseptual, GMIT mengakui bahwa pelayanan Gereja harus bersifat holistik, termasuk pemeliharaan alam semesta sebagai “oikos” yang layak untuk dihuni oleh seluruh ciptaan. Hal ini nampak dalam sejumlah dokumen GMIT, khususnya *Tata Dasar*, *Naskah Eklesiologis* dan *Pengakuan Iman* GMIT. Lalu bagaimana dengan implikasinya dalam Jemaat? Apakah ada konsistensi atau justru inkonsistensi? Mengapa demikian? Semua hal di atas terbuka untuk distudikan lebih lanjut.

€€€€

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU-BUKU:

Banawiratma, J. B. *10 Agenda Pastoral Transformatif: Menuju Pemberdayaan Kaum Miskin dengan Perspektif Adil Gender, HAM, dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Beyer, Ulrich & Simamora, Evalina. *Memberi dengan Sukacita: Tafsir dan Teologi Persembahan*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2008.

Bergant, Dianne dan Karris, Robert J. (Eds). *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Bachman, Michael. *Asian Eclipse: Exposing the Dark Side of Business in Asia*. Singapore, etc: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 1999.

Cooley, Frank L. *Benih Yang Tumbuh XI, Memperkenalkan Gereja Masehi Injili di Timor*. Jakarta: Lembaga Pembahasan dan Studi DGI, 1976.

Dommen, Edward. *How Just Is the Market Economy?* (Geneva: WCC Publication, 2003).

de Jonge, Christiaan. *Apa itu Calvinisme?* Jakarta: BPK. Gunung Mulia, cet-5, 2001.

Duchrow, Ulrich. *Mengubah Kapitalisme Dunia: Tinjauan Sejarah-Alkitabiah Bagi Aksi Politis*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2000.

Darmaputera, Eka. *Etika Sederhana Untuk Semua: Bisnis, Ekonomi dan Penatalayanan*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2001.

-----, *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005.

Fortman, Bas de Gaay dan Goldewijk, Berma Klein. *Allah dan Harta Benda: Ekonomi Global dalam Perspektif Peradaban*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2001.

Fuellenbach, John. *Kerajaan Allah: Pesan Inti Ajaran Yesus bagi Dunia Modern*. Ende: Nusa Indah, 2006.

- Hartono, Chris. *Peranan Organisasi Bagi Gereja*. Jakarta: BPK-Gunung Mulia, 1978.
- Hendriks, Jan. *Jemaat Vital dan Menarik: Membangun Jemaat dengan Menggunakan Metode Lima Faktor*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Hill, Alexander. *Bisnis yang Benar: Etika Kristen dalam Dunia Bisnis* (terj) Henry Lantang. Bandung: Kalam Hidup, 2001.
- Herawaty, Silvia. *Kewiraswastaan*. Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 1998.
- Higginson, Richard. *Called to Account, Adding Value in God's World: Integrating Christianity and Business Effectively*. Eagle: Inter Publishing Service, 1993.
- Hermans, Chris A. M. and Moore Mary E. (Eds), *Hermeneutics and Empirical Research in Practical Theology: The Contribution of Empirical Theology by Johannes A. van den Ven, Vol. II*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers and VSP, 2004.
- Jacobs, Tom. *Koinonia dalam Eklesiologi Paulus*. Malang: DIOMA, 2003.
- Mastra-Ten Veen, Made Gunaraksawati. *Teologi Kewirausahaan: Konsep dan Praktik Bisnis Gereja Kristen Protestan di Bali*. Yogyakarta: TPK & Centre for Business Ethics and Professionalism UKDW, 2009.
- Nuban Timo, E. I. *Menuju Gereja yang Mandiri dan Terbuka. Wacana bagi Pembaharuan Kehidupan Berjemaat*. Kupang: Penerbit Gita Kasih, 2009.
- , *Umat Yang Bergerak ke Tapal Batas. Percakapan Tentang Gereja. Jilid Satu: Masa Lalu Gereja*, 2009 (siap diterbitkan).
- , *Rencana Strategis MS.GMIT 2007-2011: Selangkah Maju Dalam Kemandirian Teologi, Daya dan Dana: GMIT Menyambut Hari Baru Pelayanan*. Kupang: September 2007 (tanpa penerbit).
- Novak, Michael. *Business as a Calling: Work and the Examined Life*. New York, etc: the Free Press, 1996.
- Noyce, Gaylord. *Tanggung Jawab Etis Pelayan Jemaat: Etika Pastoral*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1997.

- Nababan, H. B. (penerjemah), *Perencanaan Strategis Dalam Gereja dan Pelayanan: Dari Konsep Menuju Keberhasilan*. (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2010). Judul asli: *Church and Ministry Strategic Planning: from concept to success*.
- Prior, Jhon Mansford. *Meneliti Jemaat: Pedoman Riset Partisipatoris*. Jakarta: Gramedia, Widiasarana Indonesia, 1997.
- Peters, George W. *Teologi Pertumbuhan Gereja*. Malang: Gandum Mas, 2002.
- Pilzer, Paul Zane. *Tuhan Ingin Anda Kaya: Teologi Ilmu Ekonomi; Cara dan alasan orang bisa menikmati kekayaan materiil dan spiritual di dunia kita yang berlimpah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rainer, Thom S. & Geiger, Eric. *Simple Church*. Nashville: B&H Publishing Group, 2006.
- Singgih, E. G. *Bergereja, Berteologi, dan Bermasyarakat* (Yogyakarta: TPK, cet.II, 2007
- , *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III* (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2004
- Sudiarja, A. *Dimensi Intelektual dalam Cara Kita Bertindak*. Yogyakarta: Kolese Bellarminus, 2005.
- , *Agama (di zaman) Yang Berubah*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Sider, Ronald J. *The Scandal of the Evangelical Conscience*. Jawa Timur: Literatus Perkantas, 1997.
- Stott, John. *The Living Church: Menanggapi Pesan Kitab Suci yang Bersifat Tetap dalam Budaya yang Berubah*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, cet.2, 2009.
- Sutanto, Timotius Kurniawan. *3 Dimensi Keesaan Dalam Pembangunan Jemaat*. Jakarta: BPK.Gunung Mulia, 2008.
- Stevens, Paul. *Doing God's Business: Meaning and Motivation for the Marketplace* (Grand Rapids: William. B. Eerdmans Publishing Co, 2006.
- , *God's Business: Memaknai Bisnis Secara Kristiani* (terj). Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2008.

- Supriatno, dkk (peny), *Merentang Sejarah, Memaknai Kemandirian: Menjadi Gereja Bagi Sesama*. Bandung: Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, dan BPK. Gunung Mulia, 2009.
- Tisera, Guido. *Bercermin Pada Jemaat Perdana, Membaca dan Merenungkan Kisah Para Rasul*. Maumere: Penerbit Ledarero, 2002.
- Tulluan, Ola. *Introduksi Perjanjian Baru*. Malang: YPPI, cet.2, 1999.
- Tenney, Merrill C. *Survei Perjanjian Baru*. Malang: Gandum Mas, cet-IV, 1997.
- Van Hooijdonk, P. G. *Batu-Batu Yang Hidup: Pengantar ke dalam Pembangunan Jemaat*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Van Kooij, Rijnardus A. (dkk). *Menguak Fakta, Manata Karya Nyata*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2007.
- Wijaya, Yahya. *Business, Family and Religion: Public Theology in the Context of the Chinese-Indonesian Business Community*. Oxford, etc: Peter Lang, 2002.
- Widyatmadja, Josef P. *Yesus & Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2010.
- Wibowo, I dan Priyono B. Herry (Ed) *Sesudah Filsafat: Esai-Esai Untuk Frans Magnis Suseno*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Yewangoe, Andreas A. *Tidak Ada Ghetto: Gereja di dalam Dunia*. Jakarta: Biro Balitbang PGI dan BPK. Gunung Mulia, 2009.

B. DOKUMEN/MAJALAH/TABLOID/MAKALAH/ARTIKEL/LAPORAN/KORAN:

- C.S., J. Keizer. "Menunjang Partisipasi Jemaat, Dasar-Dasar Diagnosis dan Perencanaan Strategis", dalam: *Seri Pastoral 299 No.4, Bidang Pembangunan Jemaat*. Yogyakarta: Pusat Pastoral Yogyakarta, 1999.

*Data Perbandingan Kontribusi Sentralisasi Gaji Pokok Karyawan GMIT tahun 2010* (laporan), yang disampaikan oleh Bendahara Majelis Sinode dalam Sidang Bulanan Majelis Sinode, tanggal 10-11 Agustus 2010 di Kupang.

“Data Realisasi Kontribusi Sentralisasi Gaji Pokok Karyawan GMIT Bulan Januari 2010” dalam: *Berita GMIT, Media Informasi Pelayanan Warga Gereja, Edisi Februari 2010* Kupang: Majelis Sinode, 2010.

“Data Realisasi Kontribusi Sentralisasi Gaji Pokok Karyawan GMIT Bulan Mei 2010” dalam: *Berita GMIT, Media Informasi Pelayanan Warga Gereja, Edisi Juni 2010* Kupang: Majelis Sinode, 2010.

de Blot, Paul. “Bisnis Kaum Religius” dalam: *Majalah Rohani No. 10, tahun ke 53, Oktober 2006*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit BASIS, 2006.

Hartono, Chris. “Faham Presbiterial di dalam Alkitab,” (makalah) : disampaikan dalam Ceramah Pengabdian Kepada Masyarakat di GKI Tasikmalaya, tanggal 16 Maret 1991.

-----, “Sistem Presbiterial Sinodal: Deskripsi dan Evaluasi”, dalam: *Penuntun, Gereja dan Teologi, Vol. 1, No. 3, April-Juni*. Sinode GKI-Jawa Barat, 1995.

*Harian Umum Pos Kupang*, tanggal 25 Mei 2009.

*Informasi Kegiatan Pengawasan BPPPS dalam bulan Januari-April 2010* (laporan), disampaikan oleh Sekretaris BPPPS dalam Sidang Bulanan Majelis Sinode, tanggal 22-24 April 2010 di Kupang.

*Informasi Perkembangan Pengelolaan Personalia* (laporan), disampaikan oleh Sekretaris Komisi Personalia Majelis Sinode dalam Sidang Bulanan Majelis Sinode, tanggal 22-24 April 2010 di Kupang.

*Informasi Perkembangan Badan Diakonia Karyawan GMIT, Keadaan per 31 Maret 2010* (laporan), yang disampaikan oleh Ketua BDK-GMIT dalam Sidang Bulanan Majelis Sinode, tanggal 22 April 2010.

*Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 08/TAP/SIN-GMIT/XXIX/1999* tentang *Peraturan Pokok GMIT Mengenai Jemaat*.

Santosa, W. Teguh. “Misteri Mamon”, dalam: *Majalah Rohani No. 12, tahun ke 51, Oktober 2004*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit BASIS, 2006.

Nuban, Timo E.I. "Familia Dei" (makalah), disampaikan dalam Seminar tentang *Naskah Eklesiologi GMIT*, tanggal 20 Mei 2010 di Kupang.

*Naskah Eklesiologis GMIT*, dipersiapkan oleh Panitia Tetap Tata Gereja 2010 dan telah ditetapkan dalam Sidang Istimewa II GMIT, tanggal 28 September – 4 Oktober 2010 di Kupang.

*Pertanggungjawaban Bendahara Majelis Sinode* (laporan), disampaikan dalam Sidang Bulanan Majelis Sinode dalam rangka Evaluasi Sentralisasi Pembayaran Gaji Pendeta, tanggal 22-24 April 2010 di Kantor Sinode.

Setio, Robert. "Harga Diri Orang Miskin, Sebuah Renungan Spiritual Atas Persoalan Kemiskinan di Indonesia", dalam: *Gema Teologi: Jurnal Fakultas Teologi-UKDW Yogyakarta, Vol.32 No.2, Oktober 2008*.

*Tata GMIT 1999*. Kupang: Majelis Sinode GMIT, 1999.

*Tata GMIT tentang Peraturan Gaji Pejabat dan Karyawan GMIT Nomor: 11/TAP/SIN-GMIT/XXI/2007*, dan *Pedoman Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pokok Karyawan GMIT Nomor: 863/SK/MS-GMIT/I/2008*. Kupang: Majelis Sinode GMIT, 2008.

Zizioulas, John. "Communion Ecclesiology", dalam: Karkkainen, Veli-Matti. *An Introduction to Ecclesiology: Ecumenical, Historical & Global Perspectives*. Illionois: InterVarcity Press, 2002.

### C. ALKITAB/KAMUS/LEXICON:

*Alkitab dan Kidung Jemaat*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2009.

Mounce, William D. *The Analytical Lexicon to the Greek New Testament*. Zondervan: Publishing House, 1993.

Suharso dan Retnoningsih, Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux*, Semarang: CV. Widya Karya, 2005.